



**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 58 PERDA
KABUPATEN AGAM TENTANG PEMERINTAHAN NAGARI NO. 12 TAHUN
2007 MENGENAI WEWENANG BADAN MUSYAWARAH NAGARI (BAMUS)
DALAM PENGAWASAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO TINGGI
KECAMATAN BASO AGAM**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

**Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata (S1) Sarjana Hukum (SH)**

Oleh:

SYUKRIL AKMAL

NIM. 11524103387

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA SYIASAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1440 H/2019 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pasal 58 Perda Pemerintahan Nagari No. 12 Tahun 2007 Mengenai Wewenang Bamus Dalam Pengawasan Pemerintahan Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Agam* yang ditulis oleh :

Nama : SYUKRIL AKMAL

NIM : 11524103387

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Desember 2019

Pembimbing Skripsi

Dr. Zulfahmi Bustomi, M.A.

NIP :

UIN SUSKA RIAU



LEMBAR PENGESAHAN

Skrripsi dengan judul "TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PERDA KABUPATEN AGAM TENTANG PEMERINTAHAN NAGARI NO. 007 MENGENAI WEWENANG BADAN MUSYAWARAH NAGARI DALAM PENGAWASAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO TINGGI KECAMATAN BASO AGAM" yang ditulis oleh:

: **SYUKRIL AKMAL**
: 11524103387
: Hukum Tata Negara (Siyasah)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tim Munaqasyah pada :

: Selasa, 31 Desember 2019
: 08.00 WIB
: Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Selasa, 31 Desember 2019
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.
NIP. 19580712 1986031 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pasal 58 Perda Kabupaten Agam tentang Pemerintahan Nagari No. 12 Tahun 2007 mengenai Wewenang Badan Musyawarah Nagari (Bamus) Dalam Pengawasan Pemerintahan Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Agam,”** Latar belakang pemilihan judul ini karena temuan adanya Wali Nagari melakukan pretek kampanye untuk mendukung salah satu paslon Predisen pada tahun 2019, Badan Musyawarah Nagari selaku pengawas dinilai lemah dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintahan Nagari. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yaitu peneliti turun langsung kelapangan (kualitatif) untuk meninjau secara dekat permasalahan yang di teliti. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan wewenang Bamus dalam Pengawasan Pemerintahan Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Agam serta di tinjau menurut Fiqh Siyasah Dusturiyah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum islam yang sosiologis yang dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian lapangan dengan mengambil populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah perangkat Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam yang berjumlah 11 orang. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dikumpulkan melalui wawancara, dan tinjauan pustaka. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang disajikan secara deduktif dan induktif.

Hasil penelitian diketahui pelaksanaan Wewenang Bamus Dalam Pengawasan Pemerintahan Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Agam menurut *fiqh siyasah dusturiyah* sudah sesuai dengan teori cuma di nilai masih belum berjalan secara baik. Kurangnya fasilitas, SDM dari kepengurusan Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari masih kurang memadai, kurangnya insentif yang di berikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Agam kepada Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari Koto Tinggi, belum adanya kebijakan pemerintah Daerah Kabupaten Agam yang lebih mendorong untuk pelaksanaan wewenang BAMUS. Pelaksanaan pasal 58 Perda Pemerintahan Nagari No. 12 Tahun 2007 mengenai wewenang Bamus dalam Pengawasan Pemerintahan Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Agam belum berjalan di atas prinsip kemaslahatan umat seperti yang tertuang pada konsep *Fiqh Siyasah Dusturiyah*.

Kata Kunci : Pengawasan, Wewenang, Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT yang Maha Mengasihi dan Maha Adil, yang telah memberikan kesehatan dan keluangan waktu kepada penulis untuk dapat menyusun skripsi ini, tanpa hidayah dan taufiq-Nya tidak mungkin skripsi ini dapat diselesaikan seperti saat sekarang ini.

Shalawat dan salam kehadiran junjungan alam, sang revolusioner yang disegani oleh kawan dan lawan, yaitu Nabi Muhammad SAW, berkat perjuangan beliau Islam tersebar di berbagai penjuru dunia, sehingga umatnya terasa tentram dan damai atas ajaran-ajaran yang dibawanya.

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pasal 58 Perda Kabupaten Agam tentang Pemerintahan Nagari No. 12 Tahun 2007 mengenai Wewenang Badan Musyawarah Nagari (Bamus) Dalam Pengawasan Pemerintahan Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Agam”**. Dalam penulisan ini penulis banyak menemukan kesulitan-kesulitan dan rintangan disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana serta ilmu yang penulis miliki. Tanpa bantuan dan motivasi dari semua pihak, skripsi ini tidak akan selesai sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ayahanda (Zulfikar), ibunda (Asnamita) serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan bantuan materil, moril maupun spirituil kepada penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

3. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag, selaku Rektor UIN SUSKA RIAU dan seluruh jajaran civitas akademika UIN SUSKA RIAU.
4. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag, Wakil Dekan I bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, M.CL, Wakil Dekan II bapak Dr. Wahidin, M.Ag, dan bapak Wakil Dekan III Dr.H. Maghfirah, MA.
4. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) bapak Rahman Alwi, M.Ag serta Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) bapak Syamsudin Mu'ir, Lc. MA yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.
5. Bapak Dr. Zulfahmi Bustomi, M.A selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Penasehat Akademis (PA) penulis yang selalu memberikan saran-saran dan motivasi kepada penulis selama kuliah di UIN SUSKA RIAU ibu Dra. Hj. Irdamisraini, MA
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya dan seluruh dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada umumnya, yang telah memberikan ilmu serta pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di UIN SUSKA RIAU.
8. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), terkhusus keluarga HTNS angkatan 15 yang telah banyak membantu dan memberikan saran kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis selama belajar mengajar di bangku perkuliahan. Semoga kekeluargaan kita tetap bersatu selamanya.

Untuk semua keluarga, sahabat, teman, inspirator dan orang-orang spesial dalam hidup penulis yang memberikan motivasi dan nasehat, yang namanya tak dapat disebutkan satu-persatu, penulis ucapkan terimakasih atas semuanya. Hanya Allah SWT yang bisa membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan kepada manusia penulis mohon maaf dan semoga apa-apa yang kita kerjakan mendapat keridhoan dari Allah SWT. Amin ya robbal ‘alamin.

Pekanbaru, 09 Desember 2019

Penulis

Syukril Akmal

NIM. 11524103387

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	13
A. Sejarah Singkat Nagari Koto Tinggi.....	13
B. Letak Geografis dan Demografis Nagari Koto Tinggi	16
C. Keadaan Penduduk	17
D. Keadaan Sosial Ekonomi	18
a. Pendidikan.....	18
b. Agama.....	20
c. Ekonomi	21
E. Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari.....	22
E.1 Pengertian.....	22
E.2 Dasar Hukum.....	23
E.3 Unsur Keanggotaan	24
E.4 Mekanisme Penetapan Anggota	26
E.5 Fungsi dan Wewenang	27
E.6 Hak	28
E.7 Kewajiban.....	28
E.8 Kewajiban Anggota	28
E.9 Larangan	29



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG WEWENANG AHLU AL-HALLI WAL AQDI DALAM PENGAWASAN PEMERINTAHAN MENURUT SIYASAH DUSTURIYAH....	31
A. Pengertian	31
A.1 Pengertian Wewenang	31
A.2 Pengertian Pengawasan.....	32
A.3 Pengertian <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i>	34
A.4 Pengertian <i>Ahlu al-Halli wal Al-Aqdi</i>	37
B. Dasar Hukum	43
C. Syarat-syarat dan Mekanisme Pengangkatan <i>Ahlu al-Halli wal Al-Aqdi</i>	52
D. Fungsi, Tugas dan Wewenang <i>Ahlu al-Halli wal Al-Aqdi</i>	58

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL	65
A. Pelaksanaan Pasal 58 Perda Kabupaten Agam tentang Pemerintahan Nagari Nomor 12 Tahun 2007 Mengenai Wewenang BAMUS dalam Pengawasan Pemerintahan Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Agam	65
B. Tinjauan <i>Siyasah Dusturiyah</i> Terhadap Pelaksanaan Pasal 58 Perda Kabupaten Agam tentang Pemerintahan Nagari Nomor 12 Tahun 2007 Mengenai Wewenang BAMUS dalam Pengawasan Pemerintahan Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Agam	80

BAB V

PENUTUP	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA	
-----------------------------	--

LAMPIRAN.....	
----------------------	--



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Table : II.1 : Data Penyebaran Penduduk Menurut Kelompok Umur	18
Table : II.2 : Data Penduduk Nagari Koto Tinggi Menurut Pendidikan Tahun 2019	19
Table : II.3 : Data Sektor Pertanian dan Perkebunan Nagari Koto Tinggi	22





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam dan politik adalah sebuah keterpaduan yang saling mengikat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Para pakar politik Barat mengakui tentang integrasi keduanya, seperti Dr. V. Fitzgerald, ia berkata, “Islam bukanlah semata agama (*a religion*), namun juga merupakan sebuah sistem politik (*a political system*)”. Meskipun dekade-dekade terakhir ada beberapa kalangan dari umat Islam yang mengklaim sebagai kalangan modernis, yang berusaha memisahkan sisi itu, namun seluruh gagasan pemikiran Islam dibangun di atas fundamen bahwa kedua sisi itu saling bergandengan dengan selaras dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.¹ Landasan pemikiran ini bersesuaian juga dengan ketetapan di dalam Al-quran.

Al-quran juga menjelaskan mengenai pola politik yang di anjurkan oleh islam sebagaimana di dalam firman Allah SWT di dalam surah As-saba’ ayat 15 :

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ ۖ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ ۚ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ۚ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ ۚ وَرَبُّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : *Sesungguhnya bagi kaum Saba’ ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): Makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan*

¹ Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun.*²

Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa sistem politik islam yang di realisasikan berbentuk otonomi-otonomi atau dalam istilah lain memiliki wilayah mereka tersendiri. Penggunaan kata *di sebelah kiri* dan *di sebelah kanan* menunjukkan bahwa ada wilayah dan pola yang harus mereka ikuti agar mendapatkan kehidupan yang layak bagi kaum Saba' itu sendiri. Pemimpin dalam hal politik ini memiliki peran penting untuk mencapai kemaslahatan umatnya. Karena Islam adalah suatu sistem bernegara yang memiliki bagian-bagiannya.

Model Negara Kesatuan Islam yang di praktikkan oleh masyarakat muslim di zaman sekarang tidak lagi dalam bentuk Negara yang wilayahnya berskala internasional seperti pada masa dinasti-dinasti Islam masa lalu, melainkan dalam bentuk Negara bangsa (nation-state). Kini, umat Islam mempraktikkan Negara Kesatuan Islam dalam bentuk Negara bangsa (nation-state) sebagai respons terhadap konteks negara - negara yang berkembang di masa sekarang.³

Di dalam islam sendiri dikenal juga dengan sistem pemerintahan yang berguna untuk mencari kemaslahatan umat. Jika dilihat dari fiqh siyasah, maka persoalan tentang pemerintahan juga dikenal dengan ahl-al-hall wa al-'aqd. Ahl-al-hall wa al-'aqd. Abdul Karim Zaidan mengemukakan definisi

²Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Semarang : PT.Karya Toha Putra, 2002.

³ Mujaer Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah "Doktrin dan Pemikiran Politik Islam"* (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 201.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi adalah orang-orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Rakyat menyetujui pendapat-pendapat wakil rakyat tersebut karena mereka secara ikhlas, konsekuen, taqwa, adil dan kepandaian pikiran serta kegigihan mereka dalam memperjuangkan kepentingan rakyatnya.⁴

Adapun yang disebutkan dengan adanya dasar Ahlu al-Halli Wa al-'Aqdi dalam kitab Allah, yakni ulil amri legislatif dan pengawas atas kewenangan eksekutif.⁵ Terutama pimpinan tertinggi negara, ia hanya disebutkan dengan lafal *Al-Ummah*, dan tugasnya hanya terbatas oleh dua hal. Pertama, mengajak pada kebaikan, termasuk di dalamnya segala perkara umum yang diantaranya menetapkan hukum atau peraturan untuk rakyat yang dibuat lewat musyawarah. Kedua, menindak para penguasa yang zalim, yakni yang melakukan penyimpangan dalam pemerintahan.⁶ Sebagaimana yang telah di jelaskan oleh Al-quran di dalam surat Ali-imran ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya : Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan rakyat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung.⁷

⁴ Abdul Karim Zaudan, *Individu dan Negara Menurut Pandangan Islam* Dalam J Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, hlm. 67.

⁵ Ulil amri adalah Ahlu-Halli Wa al-'Aqdi yaitu kumpulan orang-orang profesional dalam bermacam keahlian ditengah masyarakat, mereka adalah orang-orang yang mempunyai kapabilitas yang telah teruji.

⁶ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 87

⁷ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsep ahl-al – hall wa al – ‘aqd telah populer semasa pemerintahan Khulafaurrasyidin, dan bahkan sebelumnya yaitu zaman Rasulullah Saw hanya ide konsep itu mengemuka pada masa kepemimpinan Umar, yaitu orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan gagasan mereka.⁸ Selaras dengan konsep ini, penerapannya juga di lakukan oleh beberapa negara di dunia termasuk Indonesia.

Indonesia adalah salah satu Negara yang mempraktikkan Negara kesatuan dalam bentuk Negara bangsa dan menganut sistem pemerintahan yang sama seperti masa ketika Islam masih menjadi Negara Kesatuan di masa kejayaannya yaitu dengan desentralisasi atau otonom. Jika dilihat dalam kajian fiqh siyasah, maka persoalan tentang pemerintahan daerah ini akan masuk dalam pembahasan siyasah dusturiyah, karena siyasah dusturiyah membahas tentang hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.⁹

Munculnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 merupakan suatu langkah yang dilakukan pemerintah ketika itu untuk melakukan proses demokratisasi secara tepat.¹⁰ Suatu otonomi bukan final, melainkan sebuah langkah awal. Realisasi otonomi daerah ini memberikan gambaran pemerintahan Indonesia dari otoriter menjadi demokrasi yang paling dramatis pada akhir abad ke 20. Memang sedikit dramatis untuk bisa menjalankan itu semua terhitung dari masa demokrasi Indonesia yang sangat pendek. Sesuai isi

⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001) hlm. 138.

⁹ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syar'iah*, hlm. 47.

¹⁰ Undang-undang nomor 32 tahun 2004 pasal 10, *tentang Pemerintahan Daerah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam hal menimbang huruf a, disebutkan, “bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.”¹¹

Menyikapi undang-undang ini, pemerintah Kabupaten Agam merespon sangat baik dengan munculnya Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari. Kebijakan pemerintah Kabupaten Agam lebih menegaskan kepada “*Babaliak Banagari*”.¹² Seiring dengan bertitik tolaknya peraturan Nagari dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari. Sebagaimana yang kita ketahui dalam aspek peran BAMUS Nagari, sering terjadi kurang koordinasinya antara Wali Nagari dengan BAMUS Nagari. Dalam hal ini sebagaimana yang di jelaskan dalam pasal 58 Perda Agam tentang Pemerintahan Nagari No.12 tahun 2007. Bahwa BAMUS Nagari mempunyai

¹¹ M. Busrizalti, *Hukum Pemda, Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Total Media, 2013, hlm. 64.

¹² Merupakan salah satu cita-cita yang telah lama dinantikan oleh seluruh masyarakat minangkabau. Karna makna dari babaliak banagari berarti kembali dalam tatanan kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan kepada nilai-nilai adat. Masyarakat Minang yang selama ini memegang teguh prinsip dan nilai ini, sekarang dapat mengatur bentuk pemerintahan sesuai dengan nilai-nilai dari adat itu sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fungsi pengawasan terhadap Pemerintahan Nagari. Pasal 58 ini menjelaskan bahwa wewenang BAMUS itu adalah Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Nagari dan pelaksanaan Peraturan Nagari serta Peraturan Wali nagari.

Salah satunya di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam dimana masih terjadi permasalahan antara Wali Nagari dengan BAMUS dalam hal kewenangan BAMUS, permasalahan ini terarah kepada fungsi pengawasan yang di miliki oleh BAMUS sendiri. Bamus kurang melaksanakan pengawasan terhadap kerja pemerintahan nagari. Pemahaman terhadap tugas dan wewenang kedua lembaga mungkin sepenuhnya belum dipahami. Dimana ditemukan terjadinya Wali Nagari melakukan kampanye kepada salah satu calon Presiden dan Wakil presiden di Nagari Koto Tinggi melalui penyampaianya di depan masyarakat ketika memberikan kata sambutan di salah satu mesjid yang berada di kawasan Nagari Koto Tinggi. Hasil wawancara dengan salah satu anggota BAMUS di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Agam dapat di simpulkan bahwa BAMUS hanya melakukan rancangan peraturan untuk kerja pemerintah tetapi BAMUS tidak melaksanakan pengawasan terhadap peraturan yang telah ditetapkan secara terstruktur dan sistematis. Berdasarkan latar belakang dan uraian-uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti dan menalaah dengan judul skripsi **“TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 58 PERDA KABUPATEN AGAM TENTANG PEMERINTAHAN NAGARI NO. 12 TAHUN 2007 MENGENAI WEWENANG BADAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MUSYAWARAH NAGARI (BAMUS) DALAM PENGAWASAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO TINGGI KECAMATAN BASO AGAM”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dapatlah diajukan berupa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pasal 58 Perda Kabupaten Agam tentang Pemerintahan Nagari No. 12 Tahun 2007 mengenai wewenang BAMUS dalam Pengawasan Pemerintahan Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Agam?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap pelaksanaan pasal 58 Perda Kabupaten Agam tentang Pemerintahan Nagari No. 12 Tahun 2007 mengenai wewenang BAMUS dalam pengawasan Pemerintahan Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Agam?

C. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini mencapai sasaran dan terarah, maka perlu dijelaskan tentang batasan permasalahan yang akan dituangkan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap pelaksanaan pasal 58 Perda Kabupaten Agam tentang Pemerintahan nagari No. 12 tahun 2007 mengenai wewenang BAMUS dalam pengawasan Pemerintahan Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Agam periode 2015-2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian ini antara lain:

a. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pasal 58 Perda Kabupaten Agam tentang Pemerintahan Nagari No. 12 Tahun 2007 mengenai wewenang BAMUS dalam Pengawasan Pemerintahan Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Agam.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan pasal 58 Perda Kabupaten Agam tentang Pemerintahan Nagari No. 12 Tahun 2007 mengenai wewenang BAMUS dalam pengawasan Pemerintahan Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Agam.

b. Manfaat penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti di samping untuk melengkapi persyaratan mendapatkan gelar sarjana S-1 di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, juga dapat dijadikan sebagai ajang untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama ini di bangku kuliah dalam praktek yang terjadi di lapangan.
2. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi aparaturnya Pemerintahan Nagari Koto Tinggi dalam menjalankan roda pemerintahan serta dilihat dari aspek *fiqh siyasah*.
- 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode Penelitian

1. Lokasi

Tempat atau lokasi yang menjadi objek penelitian adalah Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam. Letaknya jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Agam lebih kurang 74 KM. Dapat dijangkau dengan menggunakan transportasi darat seperti sepeda motor atau mobil. Adapun alasan penulis meneliti pada Nagari Koto Tinggi adalah karena masalah tersebut belum pernah diteliti di tempat yang bersangkutan dan data-data dapat dikumpulkan dari sumber atau informasi yang ada dan dapat dijumpai baik untuk wawancara maupun angket serta lokasinya terjangkau serta peneliti sudah mengenalnya dengan baik.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Ketua Bamus Nagari dan Aparatur BAMUS Nagari Koto Tinggi. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah pelaksanaan Wewenang BAMUS Nagari Koto Tinggi.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Adapun populasi penelitian yaitu BAMUS Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Agam berjumlah 11 orang, terdiri dari ketua, wakil, sekretaris dan sembilan orang anggota BAMUS, dan dengan menggunakan *Total Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber data, yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari *key informan* atau informan kunci yaitu terdiri dari anggota Bamus yang menjalankan wewenang di Nagari Koto Tinggi.
- b. Data sekunder, yaitu data yang didapat dari literatur dan buku-buku serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data, diperlukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu peneliti turun langsung kelapangan (kualitatif) untuk meninjau secara dekat permasalahan yang di teliti. Metode kualitatif juga sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).¹³
- b. Wawancara, yaitu proses pengumpulan data dilakukan dengan cara mewawancarai subjek penelitian.¹⁴
- c. Dokumentasi, yaitu data-data berupa dokumen atau literatur yang berhubungan dengan masalah ini yang diperoleh dari Nagari Koto Tinggi.

¹³ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XVII, Bandung: (PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 4

¹⁴ Marbun, Roy Barker, <https://www.scribd.com/doc/98949269/Proposal-Skripsi>, pada tanggal 01 Juli 2019 pukul 15:25 wib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Metode Penulisan

Data yang sudah terkumpul dianalisa dengan beberapa pendekatan antara lain :

- a. Deduktif, yaitu dengan meneliti hal-hal yang bersifat umum, di analisa, kemudian diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif, yaitu dengan meneliti hal-hal yang terperinci yang bersifat khusus, di analisa, kemudian diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif, yaitu menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

7. Metode Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Artinya, data yang diperoleh diolah secara sistematis, dengan cara mengumpulkan data dan fakta tentang kajian penelitian ini untuk kemudian digambarkan dalam bentuk penafsiran pada data yang diperoleh.

E. Sistematika Penulisan

Dalam mengemukakan dan menguraikan masalah yang ada dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu peneliti akan mengemukakan tentang sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ini akan dijelaskan tentang letak geografis, pemerintahan, agama, ekonomi dan sosial, pendidikan, transportasi dan komunikasi.

BAB III : KAJIAN TEORI

Pada bab ini akan dijelaskan tinjauan umum yang di bagi dalam dua sub bab yang membahas tentang pelaksanaan wewenang Badan Musyawarah Nagari (Bamus) pada Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam dalam menjalankan kewenangan Pemerintahan Nagari membahas tentang tinjauan umum *fiqh siyasah* yang dibagi ke dalam pengertian, kajian *fiqh siyasah*, ruang lingkup *fiqh siyasah* dan pengertian wewenang menurut *fiqh siyasah*.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Merupakan bab inti yang berisikan tentang pelaksanaan wewenang Badan Musyawarah Nagari (Bamus) pada Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam dalam menjalankan kewenangan Pemerintahan Nagari.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Nagari Koto Tinggi

Nagari Koto Tinggi telah berdiri sejak lama sesuai dengan Undang-Undang pembentukan nagari menurut adat Minangkabau dengan petunjuk dan bukti adanya tanda tanda batas yang jelas. Asal mula nama Nagari Koto Tinggi menurut etimologi / tuturan orang tua, berawal pada mula neneng moyang mencari lahan kehidupan dan pemukiman baru, mereka mendapatkan suatu tempat yang baik yaitu suatu tempat ketinggian atau tempat peninjauan kemana arah pengembangan wilayah untuk di jadikan tempat permukiman. Pada waktu menemukan tempat yang tinggi tersebut, mereka gembira dan menyebut “Ko toh nan tinggi” (inilah tempat yang tinggi), yang kemudian setelah bermukim sebutan ini berubah menjadi “**Koto Tinggi**”.¹⁵

Koto Tinggi merupakan salah satu nagari yang terletak dalam kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat, Indonesia. Nagari ini berjarak 12 KM dari Kota Bukittinggi. Ibu kota Nagari Koto Tinggi adalah Lambau. Nama Koto Tinggi berasal dari nama salah satu jorong yakni jorong Koto Tinggi yang merupakan daerah pertama yang di diami di Nagari Koto Tinggi. Kata Koto Tinggi ini di ambil dari penyebutan masyarakat di sana yang berarti tempat yang tinggi yang bisa di diami oleh masyarakat setempat. Perkembangan masyarakat Koto Tinggi sendiri dimulai

¹⁵ Profil Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam, *Dokumen Pengembangan Nagari*, hlm. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari salah satu jorong koto tinggi sendiri sampai menyebar ke jorong-jorong lain.¹⁶

Warga koto tinggi terkenal dengan kultur masyarakat yang bertipikal keras, lantaran koto tinggi berada di wilayah kabupaten Agam yang notabennya memiliki bahasa yang sedikit keras. Di salah satu jorong yang berada di Nagari Koto Tinggi sendiri memiliki sejarah yang cukup mengesankan, yaitu di jorong Batu Taba. Jorong Batu Taba sendiri merupakan perbatasan dengan wilayah kecamatan Canduang. Menurut sejarahnya wilayah Batu Taba merupakan tempat dari orang-orang pemberani Koto Tinggi yang mendiami wilayah tersebut, dikarenakan untuk menjaga perbatasan dari orang-orang kecamatan Canduang¹⁷

Nagari di pimpin oleh seorang Wali Nagari, dalam menjalankan tugasnya Wali Nagari di bantu oleh Sekretaris Nagari (SekNag) dan beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS), akan tetapi dahulunya Wali Nagari di bantu oleh beberapa Wali Jorong. Wali Jorong juga disebut Wali Korong, sebutan tersebut digunakan untuk Pimpinan Jorong. Jorong adalah pembagian wilayah administrasi di Indonesia yang berkedudukan di bawah Nagari. Dalam arti lain Jorong atau Korong adalah sekumpulan permukiman yang berdekatan dan tidak dibatasi oleh suatu lahan bukan permukiman.¹⁸

¹⁶ Ibid

¹⁷ Zulfikar (Tokoh masyarakat), wawancara, di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam, tanggal 8 Oktober 2019.

¹⁸ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jorong/Korong> Diakses pada 23 Oktober 2019 .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembagian jorong yang ada di Nagari Koto Tinggi:

1. Jorong Koto Gadang
2. Jorong Kubang Pipik
3. Jorong Koto Tinggi
4. Jorong Sungai Sariak
5. Jorong Batu Taba
6. Jorong Ladang Hutan

Visi Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam adalah:
 “Terwujudnya Nagari Koto Tinggi yang cerdas, agamis, mandiri, berbudaya untuk kesejahteraan.”

Misi Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam adalah:

1. Meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat (Good Governance).
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Nagari.
3. Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah dan stake holder.
4. Meningkatkan partisipasi seluruh element masyarakat dalam program pembangunan.
5. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan formal dan non formal sebagai pemahaman agama dan nilai-nilai adat.
6. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang religius yang di naungi kultur budaya menuju nagari Mandiri, madani dan berprestasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Mewujudkan kebiasaan hidup sehat, bersih dan tertib di tengah kehidupan masyarakat serta menjaga kelestarian hidup yang tertata rapi, bersih dan asri.
8. Mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan.
9. Meningkatkan sistem kekerabatan yang saling asah, asih dan asuh sebagai perwujudan Adat Basandi Syarak – Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).
10. Mengembangkan perekonomian masyarakat dengan mengadakan lembaga keuangan berbasis nagari serta pemberantasan kemiskinan menuju kehidupan yang lebih baik.

B. Letak Geografis dan Demografis Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam.

Secara geografis Nagari Koto Tinggi memiliki luas 15,6 Km², letaknya dikelilingi Kecamatan Canduang, Nagari Tabek Panjang, Nagari Padang Tarok dan Kabupaten Tanah Datar. Adapun batas Nagari Koto Tinggi disebelah utara berbatas dengan Nagari Tabek Panjang dan Nagari Padang Tarok, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Canduang, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar, bertepatan juga pada posisi 100° 29' 04'' BT dan 0° 17' 51'' LS, dengan luas wilayah 1.860 Ha.

Wilayah dari Nagari Koto Tinggi adalah daerah yang berombak dan berbukit. Nagari Koto Tinggi berada antara 1000 hingga 1525 meter di atas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permukaan laut. Nagari ini juga dilalui oleh Batang Jabua yang berasal dari mata air Gunung Marapi.

C. Keadaan Penduduk

Pertumbuhan merupakan salah satu faktor penting dalam masalah sosial ekonomi umumnya dan masalah penduduk khususnya. Pertumbuhan penduduk juga merupakan proses keseimbangan yang dinamis antara komponen kependudukan yang dapat menambah dan mengurangi jumlah penduduk yang meliputi komponen seperti kelahiran, kematian, migrasi masuk, migrasi keluar.¹⁹ Dengan demikian penduduk adalah investasi yang sangat menentukan terhadap kemajuan pembangunan. Untuk itu tingkat perkembangan sangat penting diketahui dalam menentukan langkah-langkah pembangunan.

Jumlah keadaan penduduk pada Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam sejumlah: laki-laki 4.364 jiwa (49,89%) dan perempuan 4.365 jiwa (50,11%). Untuk lebih rincinya penyebaran penduduk wilayah Nagari Koto menurut kelompok umur dapat di tabelkan:

¹⁹ Mulyadi, *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Persepektif Pembangunan*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2014), cet.ke-5, hlm. 99.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.1
Data penyebaran penduduk menurut kelompok umur

NO	UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	0-11 bulan	63	78	141
2	1-4 tahun	146	123	269
3	5-6 tahun	158	165	323
4	7-12 tahun	491	472	963
5	13-15 tahun	249	276	525
6	16-18 tahun	234	233	467
7	19-25 tahun	539	441	980
8	26-34 tahun	732	600	1323
9	35-49 tahun	760	764	1524
10	50-54 tahun	208	245	453

Sumber data : Arsip kantor Wali Nagari Koto Tinggi 2019

D. Keadaan Sosial Ekonomi

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu yang esensial dalam kehidupan manusia baik dalam kehidupan perorangan maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maju mundurnya suatu masyarakat dan negara ditentukan oleh bagaimana tingkatan dari pendidikan tersebut.

Pendidikan merupakan tolak ukur majunya suatu masyarakat. Artinya semangkin tinggi rata-rata tingkat pendidikan suatu masyarakat semangkin tinggi pula kemajuan yang terdapat di Nagari Koto Tinggi begitu juga dengan sebaiknya, semakin rendah tingkat pendidikan suatu masyarakat maka semangkin rendah pula kemajuan yang terdapat di Nagari Koto Tinggi.

Tingkat pendidikan masyarakat Nagari Koto Tinggi dapat di lihat pada tabel berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.2
Data penduduk Nagari Koto Tinggi menurut pendidikan Tahun 2019

NO	Keterangan	Jumlah (Orang)	Persentase %
1	Belum bersekolah	946	10,85
	Tidak Tamat SD	246	2,824
	Tamat TK	59	0,677
	Belum tamat SD	963	11,05
Lulusan Pendidikan Umum			
2	Tamat SD	1.707	19,59
	2. Tamat SMP	2.083	23,91
	3. Tamat SMA	2.014	23,12
	4. Lulusan Akademi (D1-D3)	248	2,846
	5. Lulusan Sarjana (S1-S2)	240	2,755
Lulusan Pendidikan Khusus			
3	1. Sekolah Luar Biasa	19	0,218
	2. Kursus/keterampilan	186	2,135
Jumlah		8.711	100

Sumber data : Arsip Kantor Nagari Koto Tinggi

Merupakan aspek yang sangat penting dan harus mendapatkan perhatian dari semua pihak, keberhasilan dunia pendidikan bukan saja ditentukan oleh pemerintah dan guru saja, masyarakat juga mempunyai peran yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan, aktifitas penyelenggaraan pendidikan di Nagari Koto Tinggi terdiri dari:²⁰

1. Pendidikan Umum

Pendidikan Umum yang ada di Nagari Koto Tangah yaitu TK, SD, SMP. Keberadaan sekolah tersebut sudah banyak memberikan kontribusi terhadap peningkatan Sumber Daya Manusia penduduk Nagari Koto Tangah, untuk memberikan kehidupan yang lebih baik masa akan datang.

²⁰ Sumber dari Kantor Wali Nagari Koto Tangah, diambil pada tanggal 20 Oktober 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pendidikan Dasar

Merupakan dasar dari semua kegiatan proses belajar dan mengajar mulai dari pengembangan ilmu, pembentukan karakter dan mental serta pengenalan lingkungan dan kreatifitas anak agar berkembang dan siap melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

3. Sekolah Dasar Menengah Pertama

Di Nagari Koto Tinggi terdapat satu sekolah SMP yaitu SMPN 4 Baso yang terletak di Jorong Koto Gadang serta satu MTS yaitu MTS Kubang Pipik yang terletak di Jorong Kubang Pipik.

4. Pendidikan Agama

Nagari Koto Tinggi yang berpenduduk 100% memeluk agama Islam dengan Perda No.5 tahun 2005 setiap anak yang melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi harus bisa membaca Al-Qur'an apalagi dengan perkembangan zaman yang dengan mudahnya masuk pengaruh luar yang dapat merusak sendi-sendi nilai agama, maka untuk menyikapi dan mengantisipasi perkembangan pendidikan agama di Nagari Koto Tinggi, maka didirikanlah sekolah agama mulai dari MDA/TPQ, dan MTS.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Agama

Seiring dengan kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Barat “Babaliak Kasurau” di era otonomi daerah, belum mampu di terjemahkan secara kongkrit di tengah-tengah kehidupan masyarakat, sehingga muncul kekhawatiran makin luntur dan rendahnya pemahaman agama bagi generasi muda.

Untuk mengantisipasi hal ini, telah dilakukan berbagai langkah dan upaya bagi tokoh masyarakat di Nagari Koto Tangah untuk menyemarakkan mesjid, mushalla dengan melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dan penyediaan saran prasarana ibadah.

c. Ekonomi

Kenagarian Koto Tinggi secara umum memiliki 3 faktor pendukung perekonomian masyarakat, yaitu:²¹

1. Faktor Alam (Sumber daya Alam)
2. Faktor Manusia (Sumber daya Manusia)
3. Faktor Lingkungan sosial masyarakat

Dari ketiga faktor tersebut memberikan berbagai peluang yang berpotensi untuk diolah atau dikelola dan dikembangkan sehingga memberikan keuntungan dari segi ekonomi. Peluang akan semakin terbuka jika faktor pada kualitas sumber daya manusia sudah dapat diandalkan, serta pemanfaatan sumber daya alam juga harus sesuai

²¹ *Ibid.*, hlm 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan konsep pembangunan berwawasan lingkungan. Ada berbagai potensi ekonomi di Nagari Koto Tangah, diantaranya sebagai berikut:

a) Sektor Pertanian dan Perkebunan

Luas Nagari yang mencapai 6.219 m² ini memberikan pengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat, dan ketersediaan alam.²² Penggunaan lahan di Nagari Koto Tinggi di domisili oleh areal pertanian (sawah dan ladang). Penggunaan lahan tersebut dapat di ketahui dari tabel berikut ini:

Tabel II.3
Sektor Pertanian dan Perkebunan

No	Lahan	Pertanian	Bukit	Perumahan	Tanah Ulayat	Tanah Tidur	Total Luas
	Sawah	Ladang					
1	1469	886	2.659	717	407	81	6.219

Sumber : Kantor Wali Nagari Koto Tinggi.

Berdasarkan data tersebut penggunaan lahan pertanian merupakan sektor andalan Nagari Koto Tinggi sampai saat ini. Hal ini didukung oleh kondisi alam seperti topografi, iklim, curah hujan, dan tanah yang sangat mempengaruhi aktivitas pertanian terutama komoditi padi.²³

E. Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari

1. Pengertian

Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari merupakan komponen pemerintahan Nagari, senantiasa menciptakan suasana yang kondusif guna mendukung terlaksanannya pembangunan dan pengembangan nagari

²² Sumber diambil dari kantor Wali Nagari Koto Tinggi pada tanggal 15 Oktober 2019.

²³ Ibid.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan baik, serta merangsang tumbuh dan berkembangnya kreasi peran serta masyarakat yang sehat dan dinamis dalam pembangunan nagari.

BAMUS Nagari sebagai lembaga legislatif nagari merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi, lembaga ini juga mempunyai kedudukan yang sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah nagari, yang bisa menjadi anggota BAMUS Nagari adalah warga negara Republik Indonesia penduduk nagari yang bersangkutan dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam peraturan daerah kabupaten.²⁴

BAMUS Nagari berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari. Anggota BAMUS Nagari merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya secara demokrasi melalui musyawarah.

Berbeda halnya dengan wilayah-wilayah lain yang menggunakan sebutan BPD (Badan Permusyawaratan Desa), karena wilayah tersebut menggunakan nama Desa untuk sebutan wilayah administrasi yang ada di bawah Kecamatan. Sedangkan Provinsi Sumatera Barat menggunakan nama Nagari untuk wilayah administrasi di bawah Kecamatan. Ini disebabkan Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang mendapatkan otonomi daerah oleh Pemerintah.

²⁴ Gusril Basir, *Hukum Adat Minangkabau*, (Bukittinggi : STAIN Press, 2002), hlm. 132.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dasar Hukum

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara democratic.²⁵

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, Pada Bab IV Pasal 51, menjelaskan kedudukan dari Badan Musyawarah Nagari:²⁶

“BAMUS NAGARI berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.”

Jadi dapat penulis simpulkan berdasarkan peraturan diatas, BAMUS Nagari merupakan lembaga perwakilan rakyat Nagari yang merupakan mitra kerja dari Wali Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

3. Unsur Keanggotaan

Struktur Organisasi Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari Anggota

Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari terdiri dari 5 unsur:²⁷

²⁵ Lihat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

²⁶ Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari pada pasal 38.

²⁷ Lihat Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Nagari pada pasal 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Niniak Mamak

Niniak Mamak adalah orang yang dituakan berfungsi sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga Kaum Paruik atau Jurai. Mamak yang Barajo jo Penghulu (ketua Mamak) di Minang. Tugasnya adalah menjalankan Pemerintahan Adat.²⁸

2. Alim Ulama

Alim Ulama adalah orang yang Alim dan tahu tentang Agama. Alim Ulama ini disebut juga dengan *Saluah Bendang Dalam Nagari*.²⁹ Kewajibannya menunjukkan yang baik dan yang buruk.

3. Cadiak Pandai

Cadiak Pandai adalah orang yang cepat mengerti dan berfikir, cepat dan pandai mencari pemecahan suatu masalah serta sangat teliti. Tugasnya kalau Ulama memberi fatwa, perintah pada Penghulu dan teliti pada Cadiak Pandai.

4. Bundo Kanduang

Bundo Kanduang adalah tokoh yang disegani dan dihormati didalam kaum yang merupakan kedudukan tertinggi yang dimiliki oleh wanita Minangkabau, yang mempunyai tugas yang berkaitan dengan wanita didalam Minangkabau.

²⁸ Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Ninik_Mamak pada tanggal 28 November

2019.

²⁹ *Suluah Bendang dalam Nagari* maksudnya sebagai penerang kehidupan di masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Generasi Muda

Generasi muda adalah kemanakan (keponakan) yang akan melanjutkan tradisi Adat Minangkabau, perannya sangat penting dalam Minangkabau.

Peraturan Bupati Agam Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Peraturan Nagari menjelaskan tentang keanggotaan BAMUS Nagari adalah sebagai berikut. Persyaratan Keanggotaan :³⁰

1. Anggota BAMUS NAGARI terdiri dari unsur ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, dan generasi muda.
2. Jumlah anggota BAMUS NAGARI ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan nagari.
3. Penentuan jumlah anggota BAMUS NAGARI berdasarkan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. penduduk s.d 2.000 jiwa = 5 orang
 - b. penduduk 2.001 – 4.500 jiwa = 7 orang
 - c. penduduk 4.501 – 7.000 jiwa = 9 orang
 - d. penduduk 7.001 atau lebih = 11 orang

³⁰ Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari pada pasal 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Mekanisme Penetapan Anggota

Dan mekanisme penetapan BAMUS Nagari di atur juga di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari :³¹

1. Calon anggota BAMUS NAGARI ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.
2. Musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) difasilitasi dan dipimpin oleh Walinagari selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan BAMUS NAGARI.
3. Peserta musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah unsur ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, generasi muda.
4. Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam berita acara Penetapan Anggota BAMUS NAGARI yang ditandatangani oleh Walinagari dan perwakilan setiap unsur.
5. Anggota BAMUS NAGARI terpilih disampaikan Walinagari kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lambat 3 (tiga) hari setelah berita acara ditanda tangani.

³¹ Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari pada pasal 54 .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Fungsi dan Wewenang

Dalam menjalankan fungsi dan wewenang BAMUS Nagari di atur oleh peraturan daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 :³²

1. BAMUS NAGARI berfungsi menetapkan peraturan Nagari bersama Walinagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
2. Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan tata tertib BAMUS NAGARI.

Dengan menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 57 ayat (1), BAMUS NAGARI mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Membahas Rancangan Peraturan Nagari bersama Walinagari.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Nagari dan pelaksanaan Peraturan Nagari serta Peraturan Walinagari.
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Walinagari.
- d. Membentuk panitia pemilihan Walinagari.
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- f. Menyusun tata tertib BAMUS NAGARI.

6. Hak Badan Musyawarah BAMUS Nagari

BAMUS NAGARI mempunyai hak:

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Nagari
- b. menyatakan pendapat.
- c. mengajukan rancangan Peraturan Nagari.
- d. mengajukan pertanyaan.
- e. menyampaikan usul dan pendapat.
- f. memilih dan dipilih .

³² Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari pada pasal 57 dan 58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. memperoleh tunjangan.³³

7. Kewajiban Badan Musyawarah BAMUS Nagari³⁴

1. BAMUS NAGARI mempunyai kewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan tugas dan fungsi kepada masyarakat.
2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

8. Kewajiban Anggota BAMUS NAGARI³⁵

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan.
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari.
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Pertamaan Republik Indonesia.
- d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- e. Memproses pemilihan Wali nagari;
- f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.

³³ Peraturan Daerah Kabupaten Agam nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari terdapat pada pasal 59 dan 60.

³⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Agam nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari terdapat pada pasal 61.

³⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Agam nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari terdapat pada pasal 61.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

9. Larangan Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 tahun 2007 di jelaskan juga mengenai larangan menjadi anggota BAMUS Nagari:

- (1) Pimpinan dan anggota BAMUS NAGARI tidak boleh merangkap jabatan sebagai Walinagari, Perangkat Nagari, dan Ketua Lembaga Kemasyarakatan di Nagari.
- (2) Pimpinan dan Anggota BAMUS NAGARI dilarang:
 - a. Melanggar sumpah jabatan.
 - b. Menyalah gunakan wewenang.
 - c. Merugikan kepentingan umum, meresahkan masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lainnya.
 - d. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
 - e. Sebagai pelaksana proyek nagari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG WEWENANG *AHLU AL-HALLI WA AL AQDI* DALAM PENGAWASAN PEMERINTAHAN MENURUT SIYASAH DUSTURIYAH

A. Pengertian

1. Wewenang

Sebelum penulis mengungkapkan tentang wewenang *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi* menurut *Fiqh Siyasah Dusturiyah*, maka terlebih dahulu akan membahas wewenang *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi* secara umum. Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata wewenang di samakan dengan kata kewenangan, yang dapat diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.³⁶

Menurut Arkoun, *wewenang* adalah perasaan persekutuan mendalam yang mempersatukan para anggota suatu kelompok, suatu bangsa, suatu masyarakat yang terlibat dalam suatu tindakan revolusioner, atau dalam mengejar suatu upaya eksistensi, kobaran semangat atau pemertahanan suatu jati diri yang merekapitulasikan suatu tradisi dan membuka suatu masa depan. Itulah paling kurang, lanjut Arkoun, model wewenang yang telah dicontohkan oleh para nabi, orang suci, pahlawan pembangun budaya, pemikir dan pencipta. Orang-orang inilah yang berbicara atau bertindak

³⁶ Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. (Makasar : Pustaka Refleksi, 2010), hlm 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan wibawa, yakni kata-kata atau tindakannya yang berhasil mencetak berbagai semangat baru di dalam kesadaran.³⁷

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.³⁸

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.³⁹ Berdasarkan definisi kewenangan menurut para ahli diatas, penulis berpendapat bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang beritindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengawasan

Dalam syariat Islam terdapat Teori *Hisbah*, teori *Hisbah* ialah menyuruh kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak diamalkan), dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan.⁴⁰ Menurut *Fiqh Siyash* sendiri pemahaman mengenai pengawasan adalah *wilayat al-Hisbah* hanya bertugas mengawasi hal-hal yang tampak (zahir)

³⁷ Arkoun, Mohammed, *Nalar Islami dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan dan Jalan Baru*, terj. Rahayu S. Hidayat, (Jakarta: INIS,1994), hlm 228.

³⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : PT Raja /O/ Grafindo Persada, 2013), hlm 71.

³⁹ Nurmayani S.H.,M.H, *Hukum Administrasi Daerah*,(Universitas Lampung Bandar lampung .2009), hlm 26.

⁴⁰ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah* (Jakarta : Darul Falah, 2006), hlm. 398.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sudah ma'ruf di kalangan masyarakat. Yaitu perkara-perkara umum yang tidak ada perselisihan ulama tentang kewajiban melaksanakannya ataupun meninggalkannya, atau sering juga disebut perkara-perkara yang sudah menjadi 'urf (adat) dalam keseharian masyarakat. Adapun perkara-perkara detail yang masih berupa was-was, dugaan, syak wasangka, dan memerlukan investigasi secara mendalam, pembuktian, kesaksian dan sumpah adalah bukan wewenang *wilayat al-Hisbah*, tetapi menjadi wewenang lembaga lainnya yaitu *wilayat al-Qada'* atau *wilayat al-mazalim*.

Istilah “pengawasan” yang dikenal dan dikembangkan dalam Islam merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Pengawasan pada hakikatnya adalah suatu tindakan menilai apakah telah berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan. Dengan pengawasan akan ditemukan kesalahan-kesalahan yang akan dapat diperbaiki dan yang terpenting jangan sampai kesalahan yang sama terulang lagi. Istilah “pengawasan” yang dikenal dan dikembangkan dalam Islam merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Pengawasan pada hakikatnya adalah suatu tindakan menilai apakah telah berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan. Dengan pengawasan akan ditemukan kesalahan-kesalahan yang akan dapat diperbaiki dan yang terpenting jangan sampai kesalahan yang sama terulang lagi.⁴¹ Pengawasan yang dilakukan oleh *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi* merupakan ruang lingkup *Fiqh Siyasah* yaitu pada *Fiqh Siyasah*

⁴¹ Muchsan, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan PTUN di Indonesia*. (Liberty: Yogyakarta), hlm. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dusturiyah. Agar lebih dapat memahaminya penulis akan mejabarkan pengertian *fiqh Siyasah Dusturiyah* sebagai berikut.

3. *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”. Kata “*faqaha*” diungkapkan dalam Al-Qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya”. Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath’i*). *Fiqh* merupakan ilmu tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*). Menurut istilah, *fiqh* adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syari’at yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (*tafsil*).⁴²

Kata “*siyasah*” berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasatan* yang artinya “mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan”. Oleh karena itu, berdasarkan pengertian harfiah, kata *as-siyasah* berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan arti-arti lainnya.⁴³ Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.

Menurut Ibnu Mansur (ahli bahasa di mesir) *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan dan kesejahteraan.

⁴² Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 2-3.

⁴³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari’ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 25-26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun menurut Abdurrahman, *siyasah* adalah hukum dan kebijakan yang mengatur berbagai urusan umat atau masyarakat dalam hal pemerintahan, hukum, peradilan, lembaga pelaksanaan, administrasi dan hubungan luar dengan Negara lain. Dapat dipahami bahwa *Fiqh Siyasah* adalah suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat. Di dalam buku *Fiqh Siyasah* karangan J. Suyuti Pulungan menyebutkan *siyasah* terbagi menjadi empat bagian yaitu *Siyasah Dusturiyah*, *Siyasah Maliyah*, *Siyasah Dauliyah* dan *Siyasah Dusturiyah*.⁴⁴

Siyasah Dusturiyah menurut tata bahasanya terdiri dari dua suku kata yaitu *siyasah* itu sendiri serta *dusturiyah*. Arti *siyasah* dapat kita lihat di pembahasan diatas, sedangkan *dusturiyah* adalah undang-undang atau peraturan. Secara umum *siyasah dusturiyah* adalah keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat.⁴⁵ Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (*konvensi*) maupun tertulis (*konstitusi*).

Dalam buku fiqh siyasah karangan J. Suyuthi Pulungan definisi dari *Siyasah Dusturiyah* adalah hal yang mengatur atau kebijakan yang di ambil oleh kepala negara atau pemerintahan dalam mengatur warga negaranya. Hal ini berarti *siyasah dusturiyah* adalah kajian terpenting dalam suatu negara,

⁴⁴ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah :Ajaran , Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002) hlm.39

⁴⁵ Agustina Nurhayati, *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014), hlm.42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena hal ini menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara. Yaitu keharmonisan antara warga negara dengan kepala negaranya.⁴⁶

Permasalahan di dalam fiqh *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu, didalam fiqh *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang ditentukan oleh *hal ikhwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴⁷

Fiqh *siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh *siyasah dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulli, baik ayat-ayat Al-quran maupun hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulli tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁴⁸

Fiqh *siyasah dusturiyah* dapat terbagi kepada:⁴⁹

⁴⁶ J Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm.39.

⁴⁷ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.177.

⁴⁸ A. Djazuli, *Fiqh siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.48.

⁴⁹ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan ahlu halli wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dengan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
- b. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan lain-lain.
- c. Bidang *siyasah qadlaiyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- d. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Pembahasan mengenai pengawasan kebijakan yang berguna untuk kemaslahatan umat di bahas pada konsep *siyasah tasyri'iyah*. Selanjutnya akan di bahas pada istilah *Ahlu Halli Wal Aqdi*.

4. Ahlu al-Halli wa al-Aqdi

Istilah *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi* berasal dari tiga suku kata, yaitu *ahlun*, *hallun* dan *aqdun*. Kata *ahlun* berarti ahli atau famili atau keluarga, sedangkan kata *hallun* berarti membuka atau menguraikan, sementara kata *aqdun* memiliki arti perjanjian. Dari ketiga suku kata tersebut dapat dirangkai menjadi sebuah kata (istilah) yang mempunyai arti “orang-orang yang mempunyai wewenang melonggarkan dan mengikat”.⁵⁰

⁵⁰ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bibit konsep *Ahlu Halli wa al-Aqdi* pertama kali muncul dalam masa Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab, sebelum kewafatannya menunjuk enam orang sahabat yang menjadi tim formatur untuk memilih Khalifah setelah beliau, yakni Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Saad bin Abi Waqash, Abdu al-Rahman bin Auf, Zubair bin Al-awwam, dan Thalhah bin Ubaidillah serta Abdul bin Umar. Abdullah bin Umar hanya bertindak sebagai penasihat, dan tidak berfungsi sebagai calon.⁵¹

Istilah *Ahlul halli wa al-Aqdi* dirumuskan oleh ulama *fiqh* untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka dalam wewenang untuk melonggarkan dan mengikat suatu aturan. Pradigma pemikiran ulama *fiqh* merumuskan istilah *Ahlul al-Halli wa al-Aqdi* di dasarkan kepada sistem pemilihan empat khalifah pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan, Ansar dan Muhajirin. *Ahlul al-Halli wa al-Aqdi* adalah orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Mereka menyetujui pendapat wakil-wakil itu karena ikhlas, konsekuen, takwa dan adil, dan kecermelangan pikiran serta kegigihan mereka di dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.⁵²

Seperti pendapat Rasyid Ridha yang dikutip Suyuthi, *ulil amri* adalah *Ahlul Halli wa al-Aqdi*, mereka yang mendapat kepercayaan dari umat yang terdiri dari para ulama, para pemimpin militer, para pemimpin pekerja untuk

⁵¹ Badri Yatim, *Ibid.*, hlm.35.

⁵² J. Suyuti Pulungan, *Op.Cit.*, hlm.66-67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemaslahatan publik seperti pedagang, petani, para pemimin perusahaan, para pemimpin partai politik dan para tokoh wartawan. Al-Razi juga menyamakan pengertian antara *Ahlul Halli wa al-Aqdi* dengan *ulil amri*, yaitu para pemimpin dan penguasa.⁵³

Dengan demikian, *Ahlu Halli wa al-Aqdi* dapat di definisikan sebagai sebuah lembaga yang berisi tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang yang diberi kewenangan untuk memilih seorang khalifah atau pemimpin bagi umat islam. Lembaga ini juga berhak membuat ketentuan mengenai syarat seorang yang boleh dipilih sebagai khalifah atau pemimpin. Dalam terminologi politik *Ahlul halli wa al-Aqdi* adalah dewan perwakilan rakyat (lembaga legislatif) sebagai representasi dari seluruh masyarakat (rakyat) yang akan memilih kepala negara serta menampung dan melaksanakan aspirasi rakyat.

Dari mulai masa pemerintahan khalifah Abu Bakar, semua masalah yang berhubungan dengan negara dan kemaslahatan umat apabila ia tidak menemukan penyelesaiannya di dalam Al-Quran dan Hadist maka permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara musyawarah. Jika mereka semua sepakat atas satu keputusan, maka dia pun memutuskan permasalahan tersebut sesuai hasil musyawarah tadi. Begitu pula pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, dia mempunyai orang-orang khusus dari *ulil amri* yang disebut sebagai *Ahlul Halli wa al-Aqdi* untuk melaksanakan musyawarah

⁵³ *Ibid.*, hlm.69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

guna menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan negara dan kemaslahatan umat.⁵⁴

Intuisi musyawarah di wujudkan oleh khalifah Umar bin Khattab menjadi majelis atau lembaga tertinggi sebagai lembaga pemegang kekuasaan legislatif dalam pemerintahannya. Setiap keputusan dan peraturan yang dibuat pada masa pemerintahannya diproses melalui musyawarah. Pada masa pemerintahannya di bentuk dua badan penasehat atau syura. Badan penasehat yang satu merupakan sidang umum, yang di undang bersidang bila Negara menghadapi bahaya. Sedangkan yang lainnya adalah badan khusus yang membicarakan masalah rutin dan penting. Bahkan masalah pengangkatan dan pemecatan pegawai sipil serta lainnya dibawa ke badan khusus ini dan keputusannya di patuhi.⁵⁵

Khalifah Umar mempunyai satu cara musyawarah yang belum pernah dilakukan sebelumnya, yaitu terkadang apabila ia menghadapi suatu masalah pertama ia bawa ke sidang musyawarah umum yang dihadiri oleh kaum muslimin untuk mendengarkan pendapat mereka. Kemudian masalah yang sama ia bawa ke sidang khusus yang dihadiri oleh para sahabat nabi yang senior dan cendikiawan untuk mendengarkan pendapat mereka yang terbaik. Umar juga pernah mengizinkan penduduk bermusyawarah untuk memilih calon yang pantas dan jujur menurut pendapat mereka. Hal ini terjadi ketika ia hendak mengangkat pejabat pajak untuk Kufah, Basrah, dan Syria.⁵⁶ Setelah Umar wafat, lembaga syura yang dibentuk oleh Umar segera

⁵⁴ Farid Abdul Khalid, *Op.Cit.*, hlm. 78-79.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 83.

⁵⁶ J. Sayuti Pulungan, *Op.Cit.*, hlm. 124-125.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan rapat untuk menentukan pengganti Umar sesuai dengan amanah Umar bin Khattab.

Utsman dalam memerintah juga mengedepankan musyawarah namun tindakannya cenderung menjurus nepotisme sehingga menjadi bumerang bagi dirinya sendiri dikemudian hari. Hanya pada saat pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah untuk menggantikan Utsman lemabaga Syura yang dibentuk oleh umar tidak lagi mengadakan musyawarah, namun pengangkatan Ali dilakukan melalui musyawarah oleh orang terdekat dengan keluarganya, dan dalam pemerintahannya Ali juga mengedepankan musyawarah sebagaimana yang telah dilakukan oleh pendahulunya.⁵⁷

Paradigma pemikiran ulama fikih merumuskan istilah *Ahlul Halli wa al-Aqdi* didasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan, Ansar dan muhajirin. Mereka ini oleh ulama fikih diklaim sebagai *Ahlul Hallwa al-Aqdi* yang bertindak sebagai wakil umat. Walaupun pemilahan Abu Bakar dan Ali dilakukan secara spontan atas dasar tanggung jawab terhadap kelangsungan keutuhan umat dan agama. Namun kedua tokoh tersebut mendapat pengakuan dari umat.⁵⁸

Dengan demikian, *Ahlul Halli wa al-Aqdi* terdiri dari berbagai kelompok sosial yang memiliki profesi dan keahlian yang berbeda, baik dari birokrat pemerintahan maupun tidak yang lazim disebut pemimpin formal dan pemimpin informal. Tidak semua pemimpin dan pemuka profesi dan

⁵⁷ *Ibid.*, hlm.150.

⁵⁸ Badri Yatim, *Op.Cit.*, hlm.40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keahlian yang disebut otomatis adalah anggota dari *Ahlul halli wa al-Aqdi*, sebab anggota lembaga ini harus memenuhi kualifikasi. Al-Mawardi dan Rasyid Ridha merumuskan beberapa syarat, yaitu berlaku adil dalam setiap sikap dan tindakan, berilmu pengetahuan, dan memiliki wawasan dan kearifan.

Dengan kualifikasi ini diharapkan golongan *Ahlul Halli wa al-Aqdi* dapat menentukan siapa diantara *ahl al-imamah* yang pantas menjadi kepala negara menurut syarat-syarat yang ditentukan, dan mampu memegang jabatan itu untuk mengelola urusan negara dan rakyat.⁵⁹ Secara substansial mayoritas ulama mempunyai pemahaman yang sama tentang definisi dari *Ahlul Halli wa al-Aqdi*, diantaranya yaitu :⁶⁰

- a. Sekelompok orang memilih imam atau kepala Negara. Istilah lain dari *Ahlul Halli wa al-Aqdi* adalah *ahl al-ijtihad* dan *ahl al-khiyar*.
- b. Orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang berhak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani rakyat.
- c. Orang-orang yang mampu menemukan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang muncul dengan memakai metode ijtihad. Orang berpengalaman dengan urusan masyarakat, yang

⁵⁹ J. Sayuti Pulungan, *Op.Cit.*, hlm.150.

⁶⁰ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm.255.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala keluarga, suku atau golongan.

- d. *Ahlul Halli wa al-Aqdi* adalah para ulama, para pemuka masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan masyarakat.
- e. Kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat, yaitu para amir, hakim, ulama, militer, dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik.

Dengan demikian, *Ahlul Halli wa al-Aqdi* dapat di definisikan sebagai sebuah lembaga yang berisi tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang yang diberi kewenangan untuk memilih seorang khalifah atau pemimpin bagi umat Islam. Lembaga ini juga berhak membuat ketentuan mengenai syarat seseorang yang boleh dipilih sebagai khalifah atau pemimpin. Dalam terminologi politik *Ahlu Halli wa al-Aqdi* adalah dewan perwakilan rakyat (lembaga legislatif) sebagai representatif dari seluruh masyarakat yang akan memilih kepala negara serta menampung dan melaksanakan aspirasi rakyat.

B. Dasar Hukum

*Ahlul Halli wa al-Aqdi*⁶¹ bila Al-Quran dan Sunnah sebagai dua sumber perundang-undangan Islam tidak menyebutkan *Ahlulal-Halli wa al-Aqdi* atau Dewan Perwakilan Rakyat, namun sebutan itu hanya ada di dalam turats fiqh kita di bidang politik keagamaan dan pengambilan hukum

⁶¹ *Ahlul Hall wa al-Aqdi* merupakan sebuah lembaga yang berisi tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang yang diberi kewenangan untuk memilih seorang khalifah atau pemimpin bagi umat islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

substansial dari dasar-dasar menyeluruh, maka dasar sebutan ini di dalam Al-Quran yang disebut dengan “*ulil amri*” dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya⁶². (Qs. Annisa, 4: 59)

Dan juga firmanNya :

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِيَ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٠﴾

Artinya : Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri). kalau tidaklah karena

⁶² Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, hlm 128.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu). (Qs. Annisa, 4: 83)

Dasar sebutan ini juga ada dalam mereka yang disebut dengan umat dalam firman-Nya:

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٤﴾

Artinya : “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan rakyat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar mereka adalah orang-orang yang beruntung.”⁶³ (Qs. Ali Imran, 3:104)

Tradisi musyawarah dipraktikkan pula oleh para sahabat, khususnya para *khulafa al Rasyidin* pada masa kepemimpinan mereka serta digunakan pula oleh *Ahlul Hall wa al-Aqdi* di dalam mengambil kebijakan untuk memutuskan sesuatu hal. Islam melalui bahasa wahyu Al-Quran menggunakan istilah *Syura/Musyawah*, yang dijadikan sebagai landasan utama dalam kemasyarakatan. Secara tegas disebut dalam (Qs. Asy-Syura 42:38).

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

⁶³ Ibid., hlm 192.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. (Qs. Asy-Syura 42:38).

Juga firman Qs. Ali-Imran 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.⁶⁴ (Qs. Ali Imran 159)

Dimana kelompok ini telah dipercaya oleh rakyat karena keilmuan dan kecendekiawanan serta keikhlasan mereka. Juga karena keseriusan mereka dalam membuat hukum-hukum yang diperlukan, baik yang berkenaan dengan peraturan sipil, politik dan administratif. Mereka termasuk dalam

⁶⁴ Ibid., hlm 132.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ranah *uli al-amri* yang Allah Swt wajibkan bagi kita untuk menaati mereka.⁶⁵

Dalam *Fiqh Siyash Dusturiyah* terdapat kaidah-kaidah yang sesuai dengan standar pengawasan pemerintahan. Adapun kaidah-kaidahnya adalah sebagai berikut:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.”

Kaidah ini memberikan pengertian, bahwa setiap tindakan atau suatu kebijakan para pemimpin menyangkut mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Sebab pemimpin adalah adalah pengemban amanah penderitaan rakyat banyak yang ditujukan untuk mendatangkan kebaikan.⁶⁶

Setiap tindakan pemimpin terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kepentingan umum, bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri. Penguasa adalah pengayom dan pengemban kesengsaraan umat. Kaidah ini berasal dari fatwa Imam As Syafi'i, “Kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim.”

Selain itu berdasarkan kaidah ini pula, seorang pemimpin dalam mengambil kebijakan-kebijakan terhadap sesuatu yang berhubungan dengan rakyat, tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip syari'at Islam, sehingga

⁶⁵ Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 82-83.

⁶⁶ Imam Musbiki, *Qawaid Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

andai kata penguasa menetapkan seorang yang *fasiq* untuk menjadi imam shalat pun, menurut hukum tidak dibenarkan.

Syarat, Rukun dan Dalil kaidah *تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ*.

Syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam kaidah ini adalah kemaslahatan yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan *maqasid as-syar'i*, pilihlah masalah yang terbaik diantara masalah yang mungkin tercapai, tutuplah dan hindari kemudharatan yang mungkin terjadi, mafsadat/mudarat yang lebih ringan lebih baik dari pada mafsadat yang berat. Kebijakan pemimpin dalam kaidah ini setidaknya bisa menimbulkan kepastian hukum bagi umatnya, sehingga perselisihan yang lebih besar dari perbedaan pendapat bisa dihindari.

Rukun yang harus terpenuhi dalam kaidah ini adalah :

1. Adanya pemimpin yang berdaulat, diakui kepemimpinannya, memenuhi syarat-syarat sebagai pemimpin yang baik.
2. Adanya rakyat atau umat yang dipimpin.
3. Adanya kemaslahatan yang akan dicapai, atau menghindari kemafsadatan yang lebih besar.
4. Adanya kebijakan yang berdasarkan ijtihad yang tidak bertentangan dengan *maqasid as-syar'i*.

Kaidah ini berasal dari fatwa Imam Asy-Syafi'i:

مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّاعِيَةِ مَنْزِلَةُ الْوَلِيِّ مِنَ الْيَتِيمِ

“Kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut beliau, fatwa beliau adalah berasal dari fatwa Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansyur dari Abu Ahwash dari Abi Ishaq dari Barra' bin Azib.

Pemahaman mengenai *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi* terdapat juga pada undang-undang yang ada di Indonesia. Dasar Hukum Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dapat dilihat pada ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Daerah yang merupakan pengganti Undang-undang Nomor 22 tahun 1999. Dalam ketentuan tersebut secara tegas disebutkan bahwa di Desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang merupakan Pemerintahan Desa.⁶⁷

Dasar hukumnya yaitu pada pasal 55 Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.⁶⁸

Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dikemukakan bahwa istilah Badan Permusyawaratan Desa dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat. Pembentukan pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dilakukan oleh masyarakat Desa. Dalam

⁶⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung : Nusa Media, 2009) Cetke1, hlm. 205.

⁶⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Daerah pasal 209 disebutkan Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama kepala Desa, menampungdan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian istilah BPD atau dengan kata lain sebutan bagi BPD akan berbeda antara satu Desa dengan Desa lainnya, hal tersebut tergantung atau sesuai aspirasi dan kebutuhan sertakeadaan sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 210 Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan :⁶⁹

- a) Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- b) Pimpinan badan permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- c) Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- d) Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pemahaman mengenai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah di atur juga oleh PERMENDAGRI (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor

⁶⁹ *Ibid*, hlm 207.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Tujuan Pengaturan BPD dalam Peraturan Menteri ini untuk :

- a. Mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
- c. Mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.⁷⁰

Pada tanggal 15 Januari 2019 Pemerintah telah menetapkan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam konsideren Undang-undang tersebut disampaikan bahwa Desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.

Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdaya agar menjadi mandiri, kuat, maju dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Berkenaan dengan ini Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 7 tahun 2008 tentang Nagari mempunyai pemahaman yang hampir sama dengan pola pemerintahan Desa di setiap daerah di luar Sumatera Barat. Tetapi

⁷⁰ Lihat PERMENDAGRI (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa pada pasal 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistem pemerintahan nagari berbeda dalam hal penyebutan nama lembaga beserta yang mengepalai nagari tersebut. Suatu nagari di kepalai oleh Wali Nagari berserta jajarannya. Selaras dengan ini pemerintah kabupaten Agam menerbitkan sistem *babaliak banagari*⁷¹ pada Peraturan Daerah No. 12 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari..

C. Syarat dan Mekanisme Pengangkatan *Ahl al Halli Wal Aqdi*

Mekanisme pengangkatan *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* secara jelas tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadist, tetapi Nabi SAW pernah mencontohkan pemilihan yang demokratis. Peristiwa tersebut ketika nabi meminta kepada suku *Aus* dan *Khazrad* untuk menentukan tokoh-tokoh yang mewakili mereka. Kemudian terjadilah pemilihan yang akhirnya memilih wakil masing-masing tiga dari suku *Aus* dan sembilan dari suku *Khazraj*. Dari peristiwa pemilu pertama tersebut nantinya akan menentukan bagaimana cara pemilihan *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi*.

Anggota *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* adalah para ulama, para ahli dan tokoh yang dianggap mumpuni.⁷² Tidak semua umat memenuhi kriteria sebagai anggota *Ahl al-Hall wa Al 'Aqdi*. *Al-Mawardi* merumuskan syarat-syarat legal yang harus dimiliki oleh *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* Yaitu:

- a. Adil dengan segala syarat-syaratnya.
- b. Berilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi Khalifah sesuai dengan kriteria-kriteria yang legal.

⁷¹ Suatu cita-cita yang di inginkan orang minangkabau semenjak perubahan sistem otonomi daerah dari desa ke nagari.

⁷² *Ibid.*, hlm.70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memiliki wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat dan paling efektif menjadi Khalifah, serta paling ahli dalam mengelola semua kepentingan demi kemaslahatan rakyat.⁷³

Al-Ghazali menerangkan bahwa salah seorang dari kalangan *Ahl Al Hall Wa Al-‘Aqd* yang bahnya untuk Imam dapat dianggap mengikat, adalah orang-orang yang berwewenang (*syawkah*) dan memperoleh banyak dukungan dari Rakyat.⁷⁴ Sedangkan Ibnu Khaldun hanya memberikan 4 syarat, yaitu:

- a. Memiliki Ilmu Pengetahuan.
- b. Adil
- c. Mampu melaksanakan tugas, termasuk kearifan.
- d. Sehat jasmani dalam arti panca inderanya dan anggota badan lainnya.⁷⁵

Ibnu Taimiyah menambahkan, bahwa kelompok *Ahl-Al-Hall Wa Al-‘Aqd* atau *Ulu al-Amr* terdiri dari orang-orang terpilih yang memenuhi syarat-syarat komplementer: keberanian, kekuatan, pengetahuan dan akal. Ia mengharapkan agar mereka sanggup memberi suri teladan bagi segenap lapisan masyarakat, karena kebanyakan orang cenderung meniru tingkah laku para pemimpin mereka. ”Jika para pemimpin itu baik, maka rakyat pun turut baik, tetapi bila mereka korup, rakyat pun ikut korup”. Dengan

⁷³ A. Djazuli, *Fiqh Siyash Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2003), hlm. 76

⁷⁴ *Ibid.*,

⁷⁵ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persyaratan ini diharapkan *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* dapat menentukan siapa diantara calon Khalifah yang benar-benar pantas menjadi Khalifah dan mampu memegang amanah itu untuk mengelola urusan negara dan rakyat.

Adapun dari literature lain menjelaskan bahwa di dalam memilih ulil-amri, harus diperhatikan beberapa hal untuk melaksanakan tatanan Negara:⁷⁶

- a. Mereka itu haruslah orang-orang yang benar-benar percaya dan menerima baik prinsip-prinsip tanggung jawab pelaksanaan tatanan khalifah sesuai dengan itu yang diserahkan kepada mereka, sebab tanggung jawab pelaksanaan tatanan yang bagaimanapun, tidak boleh dipikulkan atas pundak orang-orang yang menentang prinsip-prinsip serta dasar-dasar itu sendiri.
- b. Mereka itu tidak boleh terdiri dari orang-orang zalim, fasik, fakir (orang yang melakukan dosa keji seperti zina dan sebagainya), lalai akan Allah dan melanggar batasan-batasanNya, tetapi mereka haruslah terdiri atas orang-orang mukmin yang bertakwa dan beramal shaleh. Dan apabila mereka zalim atau fasik berkuasa atau merebut kekuasaan kepemimpinan.
- c. Mereka itu tidak boleh terdiri dari orang bodoh, dan dungu tetapi mereka haruslah orang-orang yang berilmu, berakal sehat memiliki kecerdasan, kearifan, kemampuan intelektual dan fisik untuk memutar roda khalifah dan memikul tanggung jawabnya.

⁷⁶ Data diambil dari http://zakki95.blogspot.com/p/blog-page_15.html di akses pada tanggal 27 November 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Mereka itu haruslah orang-orang yang amanat, sehingga dapat dipikulkan tanggung jawab kepada mereka dengan aman dan tanpa keraguan. Kriteria calon anggota legislatif (*Majelis Syura*) harus memenuhi kriteria tertentu yang telah diatur oleh syariat, bagi anggota yang berasal dari partai-partai Islam. Bagi calon anggota yang berasal dari partai-partai non-Islam, mereka diatur menurut ketentuan mereka sendiri.

Jadi, pencalonan seseorang untuk menjadi anggota badan legislatif harus benar-benar lahir dari penilaian yang jujur dari partai atau jemaah yang mencalonkannya. Bukan itu saja, para calon juga tidak dibenarkan terlibat aktif, baik secara fisik dan ekonomis, seperti turut berkampanye atau turut mengeluarkan dana untuk kepentingan kampanyenya untuk memenangkan dirinya. Setiap calon harus bersikap pasif dalam kampanye. Kemudian ada kriteria sebagai berikut:⁷⁷

- a. Akidah harus murni dan bebas dari syirik.
- b. Ibadah harus benar dan tekun.
- c. Akhlak harus mulia dan hidup sederhana.
- d. Pendirian harus Istiqamah dan tegar.
- e. Dedikasi pengorbanan terhadap Islam harus penuh.
- f. Pengetahuannya harus luas, khususnya tentang syariat.
- g. Mempunyai keahlian dan kecakapan dalam bidang tertentu.
- h. Amanah dan jujur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

⁷⁷ Di akses dari <http://sedaobagann.blogspot.com> pada tanggal 1 Desember 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kriteria diatas, sedapat mungkin harus terpenuhi. Setidaknya, 75% kriteria dasar ini harus dimiliki oleh setiap anggota badan legislatif. Dari uraian di atas, maka wajib atas rakyat untuk memilih segolongan mereka, yaitu orang-orang yang khusus dari *Ahl-Al-Hall Wa Al-'Aqd* yang mempunyai sifat –sifat yang harus ada pada mereka seperti berilmu yang dapat membantunya untuk memikirkan perkara-perkara umum dan urusan-urusan politik, berkemampuan untuk mengeluarkan keputusan dan undang-undang yang dapat mewujudkan kemaslahatan rakyat, juga berkemampuan untuk melakukan kewajiban pengawasan atas kewenangan dewan eksekutif, baik pemerintah dan penguasa, demi mencegah kemungkaran yang mungkin akan dilakukannya sebagai pelanggaran atas hak-hak Allah, dan demi menjaga hak dan kebebasan. Juga seperti syarat, harus memiliki sifat adil dan memiliki syarat-syarat lainnya yang dituntut dalam jabatannya sebagai wakil rakyat.

Di Indonesia persyaratan mengenai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Nagari (BPD), di jelaskan bahwa :⁷⁸ Persyaratan calon anggota BPD adalah :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

⁷⁸ Lihat PERMENDAGRI (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa pada pasal 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah.
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
- e. Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa.
- f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.
- g. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.
- h. Bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

D. Fungsi, Tugas dan Wewenang *Ahlul Hall wa al-Aqdi*

Lembaga Legislatif dalam suatu Negara Islam memiliki sejumlah fungsi yang harus dilakukannya.⁷⁹

1. Jika terdapat pedoman-pedoman yang jelas dari Allah SWT, dan Rasulullah SAW, meskipun legislatif tidak dapat mengubah atau menggantinya, maka hanya legislatiflah yang akan kompeten untuk menegakkannya dalam susunan dan bentuk pasal demi pasal, menggunakan definisi-definisi yang relevan serta rincian-rincian untuk mengundangkannya.
2. Jika pedoman-pedoman Al-Qur'an dan Al-Sunnah mempunyai kemungkinan interpretasi lebih dari satu, maka legislatiflah yang berhak memutuskan penafsiran mana yang harus ditempatkan dalam kitab Undang-Undang Dasar.
3. Jika tidak ada isyarat yang jelas dalam Al-Qur'an dan Al-sunnah, fungsi lembaga legislatif ini adalah untuk menegakkan hukum-

⁷⁹ Data di ambil dari <https://baniabsurd.blogspot.com/2011/12/lembaga-lembaga-kekuasaan-negara-dengan.html?m=1> di akses pada tanggal 27 November 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum yang berkaitan dengan masalah yang sama, tentunya dengan selalu menjaga jiwa hukum Islam. Dan jika sudah ada hukum-hukum dalam bidang yang sama yang telah tercantum dalam kitab-kitab *fikih*, maka dia bertugas untuk menganut salah satu di antaranya.

4. Jika dalam masalah apapun Al-Qur'an dan Al-Sunnah tidak memberikan pedoman yang sifatnya dasar sekalipun, atau masalah ini juga tidak ada dalam konvensi *Al-Khulafa' Al-Rasyidin*, maka kita harus mengartikan bahwa Tuhan telah memberikan kita bebas melakukan legislasi mengenai masalah ini menurut apa yang terbaik. Oleh karenanya, dalam kasus semacam ini, lembaga legislatif dapat merumuskan hukum tanpa batasan, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat *syari'ah*. Prinsip yang menyatakan bahwa apapun yang tidak diharamkan itu halal hukumnya. Sebaliknya, Al-Mawardi juga menyebutkan bahwa fungsi *Ahl al-Ikhtiyar* adalah “mengidentifikasi orang yang diangkat” sebagai Imam.⁸⁰

Dan sebagai legislative mereka memiliki tugas juga yang harus mereka penuhi. Tugas *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* adalah sebagai berikut:

1. Tugas untuk mengangkat dan memilih khalifah
2. Tugas untuk memecat dan memberhentikan khalifah

⁸⁰ Al Mawardi, *Al Ahkam Al Sulthaniyah*, op.cit., hlm.7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tugas untuk membuat undang-undang.⁸¹

Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dari satu dasar dari dasar-dasar syariat yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja. Tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap satu hak dari hak-hak Allah SWT.⁸²

Para ulama ushul fiqh menjelaskan bahwa di dalam Islam, kekuasaan (kedaulatan) ada ditangan umat, yang diselenggarakan oleh *Ahlul Hall wa al-Aqdi*. Kelompok ini mempunyai wewenang untuk mengangkat khalifah dan para imam, juga untuk memberhentikannya. Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemasalahatan masyarakat dan tidak bertabrakan dengan salah satu dari dasar-dasar syariat yang baku, melaksanakan peran konstitusi dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja. Tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintahan dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap suatu hak dari hak-hak Allah.⁸³

⁸¹ J Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, op.cit., hlm.66. Lihat juga Abdul Qadir Jaelani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, hlm. 191.

⁸² *Ibid.*, hlm 7.

⁸³ Farid Abdul Khaliq, *Op. Cit*, hlm. 80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari uraian para ulama tentang *Ahlul Halli wa al-Aqdi* ini tampak tugas dan wewenang nya sebagai berikut:⁸⁴

- a. *Ahlul Halli wa al-Aqdi* adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membaiai imam.
- b. *Ahlul Halli wa al-Aqdi* mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada kemaslahatan.
- c. *Ahlul Halli wa al-Aqdi* mempunyai wewenang membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Quran dan Hadist.
- d. *Ahlul Halli wa al-Aqdi* menjadi tempat konsultasi imam di dalam menentukan kebijakannya.
- e. *Ahlul Halli wa al-Aqdi* menjadi pengawas dalam berjalannya pemerintahan.

Pembahasan mengenai legislatif juga di jelaskan di Indonesia tentang, fungsi, tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi :⁸⁵

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dan ada beberapa hal dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai tugas:⁸⁶

⁸⁴ H. A. Djazuli, *Op.Cit.* hlm.76.

⁸⁵ Lihat PERMENDAGRI (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa pada pasal 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menggali aspirasi masyarakat.
- b. Menampung aspirasi masyarakat.
- c. Mengelola aspirasi masyarakat.
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat.
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD.
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa.
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya.
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Wewenang BPD juga di atur dalam peraturan yang di terapkan di Indonesia, yang mana memuat tentang:⁸⁷

- a. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi.
- b. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis.
- c. Mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya.
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa.

⁸⁶ Lihat PERMENDAGRI (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa pada pasal 32.

⁸⁷ Lihat PERMENDAGRI (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa pada pasal 63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.
- f. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- g. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- h. Menyusun peraturan tata tertib BPD.
- i. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
- j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam RAPB Desa.
- k. Mengelola biaya operasional BPD.
- l. Mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa.
- m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dengan demikian *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* merupakan sarana yang digunakan rakyat melalui wakil rakyatnya untuk memicarakan masalah - masalah kenegaraan dan kemaslahatan rakyat.⁸⁸ Imam Al - Mawardi berpendapat bahwa imam merupakan sesuatu yang niscaya. Artinya, keberadaannya sangat penting dalam suatu masyarakat atau negara. Manusia

⁸⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, op.cit. hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi tidak bermartabat, begitu juga suatu bangsa menjadi tidak berharga. Lantas bagaimana ketentuan seorang imamah yang dianggap legal.

Berdasarkan hal ini, Abdul Karim Zaidan mengemukakan definisi *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* adalah orang-orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Rakyat menyetujui pendapat - pendapat wakil rakyat tersebut karena mereka secara ikhlas, konsekuen, taqwa, adil dan kepandaian pikiran serta kegigihan mereka dalam memperjuangkan kepentingan rakyatnya.⁸⁹ *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* diwarnai dengan suasana ukhuwwah, kekeluargaan dan kerjasama didalam kebaikan dan ketaqwaan. Keanggotaan Parlemen diwarnai rasa ta'asub terhadap golongan, sektarian, dan penuh dengan persaingan yang tidak sehat.

Bertolak dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa *Ahl-Al-Hall Wa Al-'Aqd* merupakan suatu lembaga memilih. Orang-orangnya berkedudukan sebagai wakil-wakil rakyat, dan salah satu tugasnya memilih khalifah atau kepala negara. Ini menunjukkan bahwa sistem pemilihan khalifah dalam perspektif pemikiran ulama fikih, dan kecenderungan umat Islam generasi pertama dalam sejarah, adalah secara tidak langsung atau melalui perwakilan. Ini dari segi fungsionalnya, sama seperti Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR) di Indonesia sebagai lembaga tertinggi negara dan perwakilan yang personal - personalnya merupakan wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dalam pemilu, dan salah satu tugasnya adalah

⁸⁹ Abdul Karim Zaidan, *Individu dan Negara Menurut Pandangan Islam Dalam J Suyuti Pulungan, Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, hlm. 67.

memilih presiden (sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan). Namun dalam beberapa segi lain, antara *Ahl-Al-Hall Wa Al-'Aqd* dan DPR tidak identic.⁹⁰



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 68.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Wewenang BAMUS dalam pengawasan Pemerintahan Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Agam di nilai kurang berjalan secara maksimal sehingga menyebabkan terjadinya kesalahan-kesalahan terhadap kinerja kerja dari BAMUS Nagari. Penerapan yang di jelaskan pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari pada pasal 58 di nilai masih belum berjalan secara baik. Kurangnya fasilitas, SDM dari kepengurusan BAMUS Nagari masih kurang memadai, kurangnya insentif yang di berikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Agam kepada BAMUS Nagari Koto Tinggi, belum adanya kebijakan pemerintah Derah Kabupaten Agam yang lebih mendorong untuk pelaksanaan wewenang BAMUS Nagari Koto Tinggi
2. Analisis *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terhadap pelaksanaan wewenang BAMUS Nagari Koto Tinggi yang didasarkan kepada adanya regulasi Undang-Undang perda adalah dianjurkan (*mustahabbun*) dalam *fiqh siyasah dusturiyyah* karena pelaksanaan wewenang ini mendukung dengan kaidah *تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ* “Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.” Kemaslahatan pada masyarakat serta tingkat kemaslahatan lebih besar dari pada mudhoratnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Hasil dari pemaparan pembahasan skripsi penulis sebelumnya dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Wewenang BAMUS dalam pengawasan Pemerintahan Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Agam lebih ditingkatkan dan mampu melaksanakan program kerja yang sudah direncanakan.
2. Diharapkan kepada Wewenang BAMUS dalam pengawasan Pemerintahan Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Agam mengutamakan kemaslahatan masyarakat dan menjauhkan mudharat-mudharat yang bisa terjadi sehingga mampu mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang memadai.



 UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jorong/Korong> (Diakses 23 Oktober 2019)

- Amir. MS. 2006. *Adat Minangkabau Pola Dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Hlm 43-48. PT Mutiara Sumber Widya. Jakarta
- Agustina, Nurhayati. 2014 *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah*, Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung. Bandar Lampung.
- Ash-Shiddieqy, Hasby. 1974. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Bulan Bintang. Jakarta
- Bagir Manan, 2000. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Fakultas Hukum Unpad. Bandung
- Basir, Gursril. 2002. *Hukum Adat Minangkabau*, STAIN Press. Bukittinggi
- Busrizalti. 2013. *Hukum Pemda, Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Total Media
- Crystal, David. 2004. *Penguin Encyclopedia*. Penguin Books. London
- Departemen Agama RI. 2000. *Al-Quran dan Terjemahannya*. PT. Karya Toha Putra. Semarang.
- Dt. Kampung Dalam, *Menelusuri Jejak Sejarah Nagari Kurai Beserta Lembaga Adatnya*, (Sumatera Barat : Kristal Multimedia, 2002)
- H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syar'iah*
- Hidjaz, Kamal. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makassar
- Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Pustaka Harapan. Jakarta
- Iqbal, Muhammad. 2001. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Hlm 138. Gaya Media Pratama. Jakarta
- Jailani, Imam Amrusi. dkk. 2011. *Hukum Tata Negara Islam*. IAIN Press. Surabaya
- Khaliq, Farid Abdul. 2005. *Fikih Politik Islam*. Amzah. Jakarta
- Khaliq, Farid Abdul. 2005. *Fikih Politik Islam*. Sinar Grafika. Jakarta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM). 2000. *Adat Minangkabau Sejarah dan Budaya*. Tropic Offset Printing. Sumatera Barat
- Manzhur,Ibnu. 1968. *Lisan al-`Arab*. Dar al-Shadir, Jilid 4. Beirut
- Marbun, Roy Barker. 2019. <https://www.scribd.com/doc/98949269/Proposal-Skripsi>, (diakses pada tanggal 01 Juli 2019 pukul 15:25 wib)
- Moleong, Lexi J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XVII. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya
- Mulyadi. 2014. *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Persepektif Pembangunan*. Cet.ke-5 .PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Musyair, Zainuddin. 2010. *Serba-Serbi Adat Minangkabau*. Penerbit Ombak. Yogyakarta
- Navis, 1984. *Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Grafiti Pers. Jakarta
- Nurmayani S.H.,M.H. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung Bandar lampung.
- Peraturan Daerah Kabupaten Agam nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari terdapat pada pasal 59 dan 60
- Prodjodikromo, Wirjono. 1971. *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*. Eresco. Bandung
- Profil Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam, *Dokumen Pengembangan Nagari*, hlm. 9.
- Pulungan,Yasuti. 1993.*Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Rais, Dhilauddin. 2001. *Teori Politik Islam*, Gema Insani. Jakarta
- Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Rusfi, Mohammad. 2014. “Validasi Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum” Vol.XII No.1. Hal.64Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung. Bandar lampung hlm.64 tersedia di <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah.html>, di akses(8 Oktober 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sadjali, Munawir. 1991. *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. UI Press. Jakarta

Siagian, Sondang. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta

Silalahi, Ulbert M.A. 2005. *Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep*. Teori dan Dimensi. Sinar Baru Algensindo. Bandung

Situmorang, Jubair. 2012. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*. Pustaka Setia. Bandung

Sumber dari Kantor Wali Nagari Koto Tengah, diambil pada tanggal 20 Oktober 2019

Sumber diambil dari kantor Wali Nagari Koto Tinggi pada tanggal 15 Oktober 2019

Sutan, M Amir. 1997. *Adat Minangkabau, Tujuan dan Pola Hidup Orang Minang*. Mutiara Sumber Widya. Jakarta

Syarif, Mujar Ibnu dan Zada, Khamami. 2008. *Fiqh Siyasah "Doktrin dan Pemikiran Politik Islam"* hlm.201. Erlangga. Jakarta.

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 pasal 10, *tentang Pemerintahan Daerah*

Zaudan, Abdul karim..2002., "Individu dan Negara Menurut Pandangan Islam" Dalam J Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*

Zulfikar (Tokoh masyarakat), wawancara, di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam, tanggal 8 Oktober 2019

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jorong/Korong> (Diakses 23 Oktober 2019)

Amir. MS. 2006. *Adat Minangkabau Pola Dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Hlm 43-48. PT Mutiara Sumber Widya. Jakarta

Agustina, Nurhayati. 2014 *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah*, Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung. Bandar Lampung.

Ash-Shiddieqy, Hasby. 1974. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Bulan Bintang. Jakarta

Bagir Manan, 2000. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Fakultas Hukum Unpad. Bandung

Basir, Gursril. 2002. *Hukum Adat Minangkabau*, STAIN Press. Bukittinggi

Busrizalti. 2013. *Hukum Pemda, Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Total Media

Crystal, David. 2004. *Penguin Encyclopedia*. Penguin Books. London

Departemen Agama RI. 2000. *Al-Quran dan Terjemahannya*. PT. Karya Toha Putra. Semarang.

Dt. Kampung Dalam, *Menelusuri Jejak Sejarah Nagari Kurai Beserta Lembaga Adatnya*, (Sumatera Barat : Kristal Multimedia, 2002)

H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syar'iah*

Hidjaz, Kamal. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makassar

Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Pustaka Harapan. Jakarta

Iqbal, Muhammad. 2001. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Hlm 138. Gaya Media Pratama. Jakarta

Jailani, Imam Amrusi. dkk. 2011. *Hukum Tata Negara Islam*. IAIN Press. Surabaya

Khaliq, Farid Abdul. 2005. *Fikih Politik Islam*. Amzah. Jakarta

Khaliq, Farid Abdul. 2005. *Fikih Politik Islam*. Sinar Grafika. Jakarta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM). 2000. *Adat Minangkabau Sejarah dan Budaya*. Tropic Offset Printing. Sumatera Barat
- Manzhur,Ibnu. 1968. *Lisan al-`Arab*. Dar al-Shadir, Jilid 4. Beirut
- Marbun, Roy Barker. 2019. <https://www.scribd.com/doc/98949269/Proposal-Skripsi>, (diakses pada tanggal 01 Juli 2019 pukul 15:25 wib)
- Moleong, Lexi J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XVII. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya
- Mulyadi. 2014. *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Persepektif Pembangunan*. Cet.ke-5 .PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Musyair, Zainuddin. 2010. *Serba-Serbi Adat Minangkabau*. Penerbit Ombak. Yogyakarta
- Navis, 1984. *Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Grafiti Pers. Jakarta
- Nurmayani S.H.,M.H. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung Bandar lampung.
- Peraturan Daerah Kabupaten Agam nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari terdapat pada pasal 59 dan 60
- Prodjodikromo, Wirjono. 1971. *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*. Eresco. Bandung
- Profil Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam, *Dokumen Pengembangan Nagari*, hlm. 9.
- Pulungan,Yasuti. 1993.*Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Rais, Dhilauddin. 2001. *Teori Politik Islam*, Gema Insani. Jakarta
- Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Rusfi, Mohammad. 2014. “Validasi Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum” Vol.XII No.1. Hal.64Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung. Bandar lampung hlm.64 tersedia di <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah.html>, di akses(8 Oktober 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sadjali, Munawir. 1991. *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. UI Press. Jakarta

Siagian, Sondang. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta

Silalahi, Ulbert M.A. 2005. *Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep*. Teori dan Dimensi. Sinar Baru Algensindo. Bandung

Situmorang, Jubair. 2012. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*. Pustaka Setia. Bandung

Sumber dari Kantor Wali Nagari Koto Tengah, diambil pada tanggal 20 Oktober 2019

Sumber diambil dari kantor Wali Nagari Koto Tinggi pada tanggal 15 Oktober 2019

Sutan, M Amir. 1997. *Adat Minangkabau, Tujuan dan Pola Hidup Orang Minang*. Mutiara Sumber Widya. Jakarta

Syarif, Mujar Ibnu dan Zada, Khamami. 2008. *Fiqh Siyasah "Doktrin dan Pemikiran Politik Islam"* hlm.201. Erlangga. Jakarta.

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 pasal 10, *tentang Pemerintahan Daerah*

Zaudan, Abdul karim..2002., "Individu dan Negara Menurut Pandangan Islam" Dalam J Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*

Zulfikar (Tokoh masyarakat), wawancara, di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam, tanggal 8 Oktober 2019

UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PASAAN PERDA KABUPATEN AGAM TENTANG PEMERINTAHAN NAGARI NO. 12 TAHUN 2007 MENGENAI WEWENANG BADAN MUSYAWARAH NAGARI (BAMUSNAG) DALAM PENGAWASAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO TINGGI KECAMATAN BASA AGAM" yang ditulis oleh:

SYUKRIL AKMAL
11524103387
: Hukum Tata Negara (Siyasah)

telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Selasa, 31 Desember 2019
TIM PENGUJI MUNAQASYAH


.....


.....


.....


.....

UIN SUSKA RIAU

Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Erni, S.Sos., M.M
NIP. 19680226 199103 2 002



SURAT KETERANGAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

: SYUKRIL AKMAL

: 11524103387

: HUKUM TATA NEGARA SYIASAH

: TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 58 PERDA KABUPATEN AGAM TENTANG PEMERINTAHAN NAGARI NO. 12 TAHUN 2007 MENGENAI WEWENANG BADAN MUSYAWARAH NAGARI (BAMUS) DALAM PENGAWASAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO TINGGI KECAMATAN BASO AGAM

Pemimbing : Dr. Zulfahmi Bustomi, M.A

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 13 Januari 2020

Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN
SAL 58 PERDA PEMERINTAHAN NAGARI NO. 12 TAHUN 2007 MENGENAI
WENANG BAMUS DALAM PENGAWASAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO
TINGG KECAMATAN BASO AGAM, ditulis oleh saudara :

Nama
NIM

: SYUKRIL AKMAL
: 11524103387

Program Studi

: Hukum Tata Negara Siyasa

Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal

: Rabu / 14 Agustus 2019

Narasumber

: AHMAD ADRI RIVA'I, M.Ag

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Agustus 2019

Narasumber

Kabag Tata Usaha

Erni, S.Pd., MM

NIP. 19580226 199103 2 002

Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

NIP. 19730223 199803 1 004

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/25362
TENTANG



032010

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca surat permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/25362/2019 Tanggal 19 Agustus 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

: SYUKRIL AKMAL
: 11524103387
: HUKUM TATA NEGARA
: S1
: PEKANBARU
: TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 58
PERDA PEMERINTAHAN NAGARI NO.12 TAHUN 2007 MENGENAI
WEWENANG BAMUS DALAM PENGAWASAN PEMERINTAHAN NAGARI
KOTO TINGGI KECAMATAN BASO AGAM
: NAGARI KOTO TINGGI KECAMATAN BASO AGAM

yang ketentuan sebagai berikut:

tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Pada pelaksanaan yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 21 Agustus 2019

UIN SUSKA RIAU



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Salinan Kepada :

1. Badan Kestuhan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
3. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang bersangkutan



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342
http://dpmpstps.sumbareprov.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B.070 / 851 - PERIZ/DPM&PTSP/VIII/2019

Rekomendasi Penelitian

Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Sesuai Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMTSP/NON L2IN-RISET/25362 tanggal 21 Agustus 2019 tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Sehingga menerangkan bahwa kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

- : SYUKRIL AKMAL
- : BASO, 01 JULI 1996
- : Mahasiswa
- : Batu Taba Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kab Agam
- : 1306080107960001
- : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 58 PERDA PEMERINTAHAN NAGARI NO. 12 TAHUN 2007 MENGENAI WEWENANG BAMUS DALAM PENGAWASAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO TINGGI KECAMATAN BASO AGAM
- : Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Agam
- : 6 Bulan (Agustus 2018 - Januari 2019)

ketentuan sebagai berikut :

- Tidak menginformasi dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
- Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
- Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
- Jika terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 21 Agustus 2019

AN. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Salinan ini telah diunggah secara elektronik menggunakan
Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN BASO
NAGARI KOTO TINGGI

Alamat: Jln. Raya Baso – Batu Sangkar Km. 3 dari Baso, Telp. 0752 – 7003378 Lantehua Koto Tinggi Kode Pos 26192

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor: 420/ 857 /KT-2019.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang berandaangan di bawah ini :

: IDRALISMA

: Plh. Walinagari Koto Tinggi

Yang menerangkan bahwa :

: SYUKRIL AKMAL

: 11524103387

: Baso, 1 Juli 1996

: 1306080107960001

: Hukum Tata Negara (Siyasah) S 1

Tempa Tgl lahir

NIK

Jurusan/ Program studi

Sehubungan surat Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Faklutas Syari'ah dan Hukum

Nomor : Un.04/F.1.1/PP.00.9/6174/2019 tanggal 31 Juni 2019, tentang izin melakukan Prariset.

Melalui ini Pemerintah Nagari Koto Tinggi menerangkan bahwa yang bersangkutan telah

melakukan penelitian di Nagari Koto Tinggi dengan judul " Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap

pelaksanaan Pasal 58 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 tahun 2007 tentang

Wewenang Kamus Dalam Pengawasan Pemerintahan Nagari Koto Tinggi Kecamatan

Baso

Dengan ini surat keterangan ini kami keluarkan dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

UIN SUSKA RIAU

Dikeluarkan di : Koto Tinggi.

Pada tanggal : 25 Oktober 2019.

Plh. WALI NAGARI ,



Bagian Ketiga
Tunjangan Purna Bhakti
Pasal 50

Wakil nagari dan Perangkat Nagari yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja secara berturut-turut sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun diberikan tunjangan Purna Bhakti sebesar dua bulan penghasilan tetap.

BAB VI
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 51

BAMUS NAGARI berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.

Bagian Kedua
Persyaratan Anggota BAMUS NAGARI
Pasal 52

Yang dapat dipilih menjadi Anggota BAMUS NAGARI adalah penduduk dan anak nagari dengan syarat-syarat:

- beribadah kepada Allah SWT dengan menjalankan syariat Islam secara kaffah, berakhlakul karimah dan pandai membaca Al Quran;
- setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Pertamaan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- berpendidikan sekurang-kurangnya tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
- berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- sehat jasmani dan rohani;
- tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling rendah 5 (lima) tahun;
- tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- tidak pernah melanggar ketentuan adat;
- bertempat tinggal di nagari yang bersangkutan dan atau bertempat tinggal yang mudah diakses setelah terpilih menjadi anggota BAMUS NAGARI.

Bagian Ketiga

Keanggotaan

Pasal 53

- 1) Anggota BAMUS NAGARI terdiri dari unsur ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, dan generasi muda.
- 2) Jumlah anggota BAMUS NAGARI ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan nagari.
- 3) Penentuan jumlah anggota BAMUS NAGARI berdasarkan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagai berikut :

- penduduk s.d 2.000 jiwa	= 5 orang
- penduduk 2.001 – 4.500 jiwa	= 7 orang
- penduduk 4.501 – 7.000 jiwa	= 9 orang
- penduduk 7.001 atau lebih	= 11 orang

Bagian Keempat

Mekanisme Penetapan Anggota BAMUS NAGARI

Pasal 54

- 1) Calon anggota BAMUS NAGARI ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.
- 2) Musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) difasilitasi dan dipimpin oleh Walinagari selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan BAMUS NAGARI.
- 3) Peserta musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah unsur ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, generasi muda.
- 4) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Anggota BAMUS NAGARI yang ditandatangani oleh Walinagari dan perwakilan setiap unsur.
- 5) Anggota BAMUS NAGARI terpilih disampaikan Walinagari kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 3 (tiga) hari setelah Berita Acara ditanda tangani.

Bagian Kelima

Pengesahan dan Penetapan Anggota BAMUS NAGARI

Pasal 55

- (1) Pengesahan anggota BAMUS NAGARI terpilih ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengesahan anggota BAMUS NAGARI kepada Camat.

Pasal 56

Selambat-lambatnya 15 (lima belas hari) hari setelah ditetapkannya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1), anggota BAMUS NAGARI yang bersangkutan dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (1), anggota BAMUS NAGARI bersumpah secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Susunan kata-kata sumpah anggota BAMUS NAGARI adalah sebagai berikut :

"Demi Allah saya bersumpah :

- bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota BAMUS NAGARI dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;
- bahwa saya akan selalu taat dalam menjalankan Syariat Islam dan norma adat serta mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara;
- bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi nagari, daerah dan Negara Pertamaan Republik Indonesia."

Bagian Keenam

Fungsi dan Wewenang

Pasal 57

(1) BAMUS NAGARI berfungsi menetapkan Peraturan Nagari bersama Walinagari, merampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

(2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan tata tertib BAMUS NAGARI.

Pasal 58

Dengan menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 57 ayat (1), BAMUS NAGARI mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Membahas Rancangan Peraturan Nagari bersama Walinagari;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Nagari dan pelaksanaan Peraturan Nagari serta Peraturan Walinagari;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Walinagari;
- d. Membentuk panitia pemilihan Walinagari;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- f. Menyusun tata tertib BAMUS NAGARI.

Bagian Ketujuh

Hak, Kewajiban dan Larangan

Paragraf 1

Hak

Pasal 59

BAMUS NAGARI mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Nagari;
- b. menyatakan pendapat.

Pasal 60

Anggota BAMUS NAGARI mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan Peraturan Nagari;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. memperoleh tunjangan.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 61

1) BAMUS NAGARI mempunyai kewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan tugas dan fungsi kepada masyarakat.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 62

Anggota BAMUS NAGARI mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Pertamaan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan Walinagari;
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan

- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Paragraf 3

Larangan

Pasal 63

1. Pimpinan dan anggota BAMUS NAGARI tidak boleh merangkap jabatan sebagai Wakil nagari, Perangkat Nagari, dan Ketua Lembaga Kemasyarakatan di Nagari.
2. Pimpinan dan Anggota BAMUS NAGARI dilarang :
 - a. Melanggar sumpah jabatan;
 - b. Menyalahgunakan wewenang;
 - c. Merugikan kepentingan umum, meresahkan masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lainnya;
 - d. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; dan
 - e. Sebagai pelaksana proyek nagari.

Bagian Kedelapan

Masa Keanggotaan dan Pemberhentian

Paragraf 1

Masa Keanggotaan

Pasal 64

- (1) Masa jabatan anggota BAMUS NAGARI adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Anggota BAMUS NAGARI dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Paragraf 2

Pemberhentian

Pasal 65

Keanggotaan BAMUS NAGARI berhenti atau diberhentikan karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 52 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf i;
- d. Melalaikan tugas-tugasnya sebagai anggota BAMUS NAGARI;
- e. Melanggar sumpah sebagai anggota BAMUS NAGARI;

- f. Melanggar larangan sebagai anggota BAMUS NAGARI;
Tidak lagi mendapat kepercayaan dari unsur yang diwakilinya.

Pasal 66

Tata cara pemberhentian dan penggantian antar waktu anggota BAMUS NAGARI diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pimpinan BAMUS NAGARI

Pasal 67

- 1) Pimpinan BAMUS NAGARI terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris dan sekaligus merangkap sebagai anggota.
- 2) Pimpinan sementara BAMUS NAGARI adalah anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Paragraf 4

Tata Cara Pemilihan Pimpinan BAMUS NAGARI

Pasal 68

- 1) Pimpinan BAMUS NAGARI sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (2) memilih musyawarah untuk memilih pimpinan BAMUS NAGARI definitif.
- 2) Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) dihadiri oleh seluruh anggota BAMUS NAGARI.
- (3) Apabila seluruh anggota BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak terpenuhi, musyawarah ditunda selama 1 (satu) jam.
- (4) Setelah penundaan 1 (satu) jam, kehadiran seluruh anggota tidak terpenuhi, musyawarah harus dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BAMUS NAGARI.
- (5) Apabila jumlah anggota BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak terpenuhi, maka musyawarah dibatalkan.

Paragraf 5

Tata Tertib

Pasal 69

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan rapat/sidang BAMUS NAGARI, terlebih dahulu BAMUS NAGARI menetapkan peraturan tata tertib.
- (2) Peraturan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan melalui sidang BAMUS NAGARI.
- (3) Peraturan tata tertib ditetapkan dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagian Kesembilan
Sekretariat BAMUS NAGARI

Pasal 70

1. Dalam melaksanakan tugasnya, BAMUS NAGARI dibantu oleh Sekretariat BAMUS NAGARI.
2. Sekretariat BAMUS NAGARI dipimpin oleh Sekretaris BAMUS NAGARI.

Bagian Kesepuluh

Keuangan

Pasal 71

- 1) Pimpinan dan anggota BAMUS NAGARI menerima penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan nagari.
- 2) Tunjangan Pimpinan dan Anggota BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Nagari.

Pasal 72

- 1) Untuk kegiatan BAMUS NAGARI disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Nagari.
- 2) Pengelolaan biaya operasional dikelola oleh Sekretaris BAMUS NAGARI.
- 3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Nagari.

BAB VII

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI NAGARI

Bagian Pertama

Asas

Pasal 73

Peraturan Perundang-undangan di Nagari dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 74

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas :

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- h. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- i. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

(2) Selain asas sebagaimana ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan

Bagian Kedua

Jenis- jenis Peraturan Perundang-undangan di nagari

Pasal 75

Jenis Peraturan Perundang-undangan di nagari meliputi :

- a. Peraturan Nagari;
- b. Peraturan Walinagari;
- c. Keputusan Walinagari;
- d. Instruksi Walinagari.

Bagian Ketiga

Materi Peraturan Perundang-undangan di nagari

Pasal 76

- (1) Peraturan Nagari memuat seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pembangunan nagari, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan Walinagari memuat penjabaran pelaksanaan Peraturan Nagari yang bersifat pengaturan.
- (3) Keputusan Walinagari memuat penjabaran pelaksanaan Peraturan Nagari dan Peraturan Walinagari yang bersifat penetapan.
- (4) Instruksi Walinagari memuat perintah dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan atau untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Materi Peraturan Nagari, Peraturan Walinagari dan Keputusan Walinagari tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bagian Keempat

Penyusunan Peraturan Nagari

Pasal 78

Rancangan Peraturan Nagari dapat berasal dari Pemerintah Nagari atau BAMUS NAGARI.

Pasal 79

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis terhadap rancangan Peraturan Nagari.

Pasal 80

Rancangan Peraturan Nagari dibahas bersama oleh Pemerintah Nagari dan BAMUS NAGARI

Pasal 81

- (1) Rancangan Peraturan Nagari yang telah disetujui oleh Walinagari dan BAMUS NAGARI disampaikan oleh Pimpinan BAMUS NAGARI kepada Walinagari untuk ditetapkan menjadi Peraturan Nagari.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 82

- (1) Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Walinagari dengan membubuhkan tandatangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Nagari tersebut.
- (2) Dalam hal rancangan Peraturan Nagari tidak ditetapkan oleh Walinagari dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rancangan Peraturan Nagari tersebut menjadi Peraturan Nagari dan wajib diundangkan dengan memuatnya dalam Berita Daerah.

(3) Dalam hal sahnya rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud ayat (2) rumusan kalimat pengesahannya berbunyi “Peraturan Nagari ini dinyatakan sah” dengan mencantumkan tanggal sahnya.

(4) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Nagari sebelum pengundangan Peraturan Nagari kedalam Berita Daerah.

Pasal 83

- (1) Peraturan Nagari dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Nagari tersebut.
- (2) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berlaku surut.

Pasal 84

- (1) Peraturan Nagari disampaikan oleh Walinagari kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (2) Hasil evaluasi terhadap peraturan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kepada Walinagari.

Bagian Kelima

Pengundangan

Pasal 85

- (1) Pengundangan Peraturan Nagari dilakukan dengan memuat dalam Berita Daerah.
- (2) Pemuatan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, mekanisme dan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Nagari diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KEUANGAN NAGARI

Bagian Pertama

Umum

Pasal 87

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan nagari yang menjadi kewenangan nagari didanai oleh APB Nagari, bantuan pemerintah daerah dan bantuan pemerintah.



PEDOMAN WAWANCARA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. BAGAIMANA WEWENANG BAMUS DALAM PENGAWASAN YANG DI LAKUKAN OLEH BADAN MUSYAWARAH NAGARI KOTO TINGGI ?
2. APAKAH SEMUA ANGGOTA BAMUS MENGETAHUI PEKERJAAN MEREKA MASING-MASING ?
3. APAKAH ANGGOTA BAMUS MELAKUKAN PEKERJAANNYA MEREKA SELURUHNYA ?
4. BAGAIMANA PANDANGAN BAPAK/IBUK BAGI ANGGOTA BAMUS YANG TIDAK MENGETAHUI WEWENANG MEREKA ?
5. APAKAH WEWENANG BAMUS SUDAH BERJALAN DENGAN MAKSIMAL ?
6. APASAJA KENDALA YANG DIHADAPI BAMUS UNTUK MELAKUKAN KINERJANYA ?
7. MENYANGKUT KESALAHAN KESALAHAN YANG TERJADI DI NAGARI KOTO TINGGI, SEJAUH BAPAK/IBUK MENJABAT APAKAH ADA KESALAHAN YANG TERJADI DI NAGARI KOTO TINGGI MENGENAI TUGAS DARI BAMUS SENDIRI ?
8. TERKAIT PENGAWASAN YANG DILAKUKAN BAMUS, MENGENAI KESALAHAN YANG DI LAKUKAN OLEH WALI NAGARI, APAKAH BAMUS ADA MELAKUKAN PROSES TERHADAP WALI NAGARI YANG MELAKUKAN KESALAHAN ?



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAGAIMANA LANGKAH-LANGKAH YANG DILAKUKAN OLEH
BAMUS UNTUK MELAKUKAN PROSES TERHADAP WALI NAGARI ?

BAGAIMANA TANGGAPAN DARI SELURUH ANGGOTA BAMUS
MENGENAI PROSES YANG DI LAKUKAN BAMUS TERHADAP WALI
NAGARI ?

BAGAIMANA TANGGAPAN BAPAK/IBUK TENTANG MEKANISME
YANG DI BERIKAN BAMUS UNTUK MEMPROSES WALI NAGARI
YANG BERMASALAH ?

APAKAH ADA SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG UNTUK
KINERJA BAMUS DI NAGARI KOTO TINGGI ?

BAGAIMANA RESPON DARI MASYARAKAT TERHADAP
KEBIJAKAN KEBIJAKAN YANG DI LAHIRKAN OLEH BAMUS
NAGARI ?

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ketua BAMUS Nagari Koto Tinggi



Wawancara dengan Sekretaris BAMUS Nagari Koto Tinggi



Wawancara dengan salah seorang anggota BAMUS Nagari Koto Tinggi

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis bernama **SYUKRIL AKMAL** yang lahir pada tanggal 01 Juli 1996 di Jorong Batu Taba Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari ayah yang bernama Zulfikar dan Ibu yang bernama Asnamita.

Adapun riwayat pendidikan formal yang telah penulis tempuh adalah sebagai berikut : tamat pendidikan Sekolah Dasar pada SDN 12 Koto Tinggi pada tahun 2008. Melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Tarbiyah Islamiyah Canduang pada tahun 2008-2012, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Tarbiyah Canduang pada tahun 2012-2015. Kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Syaria'ah dan Hukum jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) pada tahun 2015-2019.

Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan magang (PKL) di Kejaksaan Negeri (KEJARI) Bukittinggi, dan juga telah melaksanakan pengabdian masyarakat (KKN) di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuatan Singigi di bulan Juli-Agustus pada tahun 2018.

Penulis melakukan penelitian pada bulan Januari 2019 dengan judul - "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pasal 58 Perda Kabupaten Agam tentang Pemerintahan Nagari No. 12 Tahun 2007 Mengenai Wewenang Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) Dalam Pengawasan Pemerintahan Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Agam". Akhirnya pada tanggal 30 Desember 2019 penulis dimunaqasyahkan dalam sidang ujian sarjana (S1) Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dengan predikat kelulusan "Sangat Memuaskan" dengan IPK 3,50. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Amin ya rabbal 'alamin....